



PETA PROSES BISNIS

2025 ~ 2029

**Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian**



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511
Website : diskominfosip.mamujukab.go.id | Email : diskominfosip@mamujukab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PETA PROSES BISNIS TAHUN 2025 - 2029
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah serta dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelaksanaan tugas serta hubungan kerja, diperlukan peta proses bisnis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Tahun 2025 - 2029 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Penyusunan Peta Proses Bisnis Tahun 2025 - 2029 merupakan acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi sehingga menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 8 Mei 2026

KEPALA DINAS



AKHMAD TAUFIQ, S.IP., M.Si.

Pangkat : Pembina

Nip : 19790102 201101 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju di Mamuju;
2. Inspektur Daerah Kab. Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju

Peta Proses Bisnis

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

2025-2029

Bizagi Modeler

Table of Contents

PETA PROSES BISNIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2025-2029 6

1 PETA INDUK 9

2 SASARAN 01 PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS INFORMASI PUBLIK BAGI MASYARAKAT 10

3 KOMINFOSIP 01.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 11

4 KOMINFOSIP 01.01.01 CFM 01 RELASI MEDIA 12

5 KOMINFOSIP 01.01.01 CFM 02 KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI PUBLIK 13

6 KOMINFOSIP 01.01.01 CFM 03 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 14

7 KOMINFOSIP 01.01.01 CFM 04 MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK 15

8 KOMINFOSIP 01.01.01 CFM 05 DISEMINASI INFORMASI 16

9 KOMINFOSIP 01.01.01 CFM 06 PENYUSUNAN KONTEN 17

10 SASARAN 02 PENINGKATAN IMPLEMENTASI (SPBE) 18

11 KOMINFOSIP 02.01 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 19

12 KOMINFOSIP 02.01.01 CFM 01 PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA 20

13 KOMINFOSIP 02.01.01 CFM 02 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG 21

14 KOMINFOSIP 02.01.01 CFM 03 KOORDINASI PENINGKATAN DATA DAN INFORMASI 22

15 SASARAN 03 PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA STATISTIK 23

16 KOMINFOSIP 03.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 24

17 KOMINFOSIP 03.01.01 CFM 01 PENGELOLAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL 25

18 KOMINFOSIP 03.01.01 CFM 02 PEMENUHAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA 26

19 KOMINFOSIP 03.01.01 CFM 03 KOORDINASI DAN KOLABORASI PENYELENGGARAAN STATISTIK 27

20 SASARAN 04 PENINGKATAN KEAMANAN INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER 28

21 KOMINFOSIP 04.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 29

22 KOMINFOSIP 04.01.01 CFM 01 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI 30

23 KOMINFOSIP 04.01.01 CFM 02 PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN 31

24 KOMINFOSIP 04.01.02 CFM 01 OPERASIONALISASI LAYANAN KEAMANAN INFORMASI 32

25 SASARAN 05 PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH 33

26 KOMINFOSIP 05.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34

27 KOMINFOSIP 05.01.01 CFM 01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 35

28 KOMINFOSIP 05.01.01 CFM 02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 36

29 KOMINFOSIP 05.01.01 CFM 03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 37

30 KOMINFOSIP 05.01.01 CFM 04 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 38

31 KOMINFOSIP 05.01.01 CFM 05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD 39

32 KOMINFOSIP 05.01.01 CFM 06 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 40

33 KOMINFOSIP 05.01.01 CFM 07 PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH 41

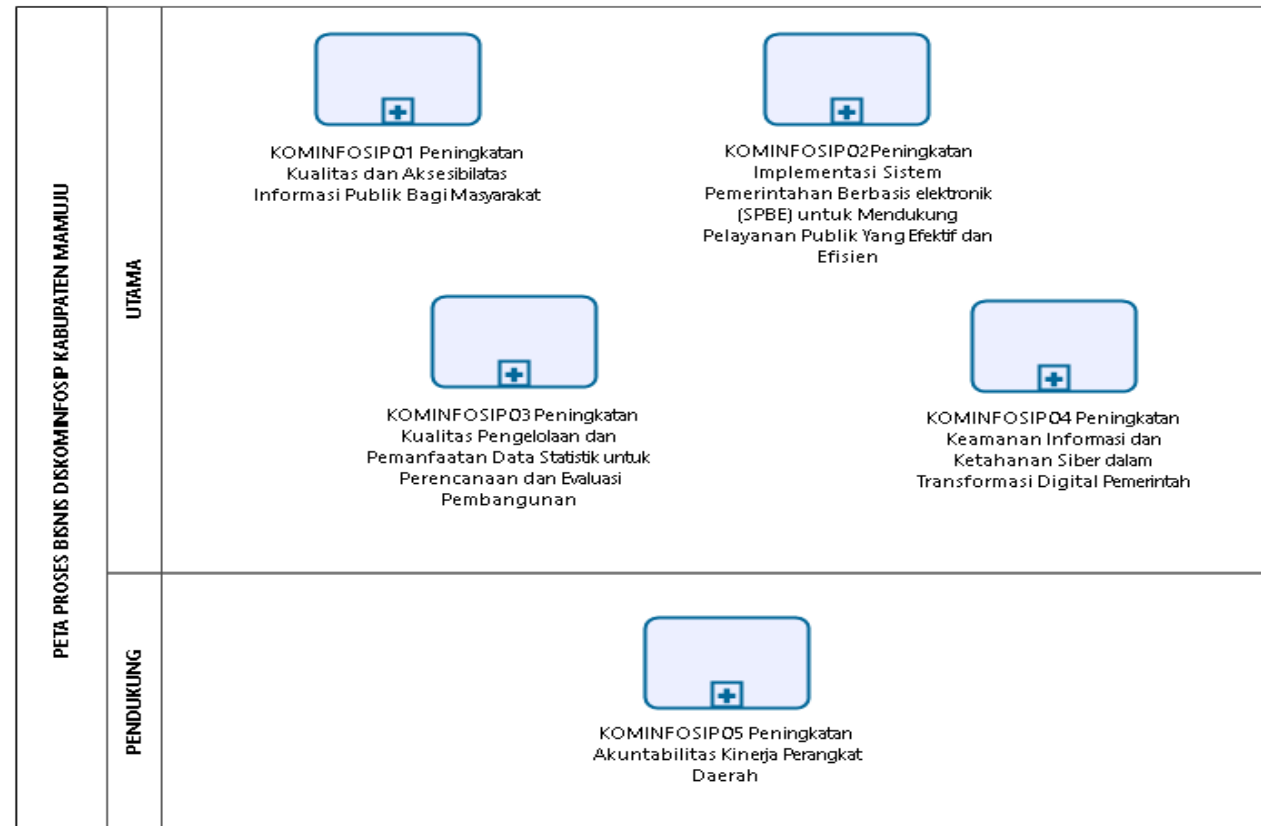
34 KOMINFOSIP 05.01.01 CFM 08 PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH 42

35 KOMINFOSIP 05.01.02 CFM 01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 43

36 KOMINFOSIP 05.01.02 CFM 02 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 44

37	KOMINFOSIP 05.01.02 CFM 03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	45
38	KOMINFOSIP 05.01.02 CFM 04 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	46
39	KOMINFOSIP 05.01.03 CFM 01 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	47
40	KOMINFOSIP 05.01.03 CFM 02 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	48
41	KOMINFOSIP 05.01.04 CFM 01 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	49
42	KOMINFOSIP 05.01.04 CFM 02 MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	50
43	KOMINFOSIP 05.01.04 CFM 03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI	51
44	KOMINFOSIP 05.01.05 CFM 01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	52
45	KOMINFOSIP 05.01.05 CFM 02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	53
46	KOMINFOSIP 05.01.05 CFM 03 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	54
47	KOMINFOSIP 05.01.05 CFM 04 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55
48	KOMINFOSIP 05.01.05 CFM 05 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	56
49	KOMINFOSIP 05.01.06 CFM 01 PENGADAAN MEBEL	57
50	KOMINFOSIP 05.01.06 CFM 02 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	58
51	KOMINFOSIP 05.01.07 CFM 01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	59
52	KOMINFOSIP 05.01.07 CFM 02 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60
53	KOMINFOSIP 05.01.07 CFM 03 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	61
54	KOMINFOSIP 05.01.08 CFM 01 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	62
55	KOMINFOSIP 05.01.08 CFM 02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	63
56	KOMINFOSIP 05.01.08 CFM 03 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	64
57	KOMINFOSIP 05.01.08 CFM 04 PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA	65
58	KOMINFOSIP 05.01.08 CFM 05 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	66

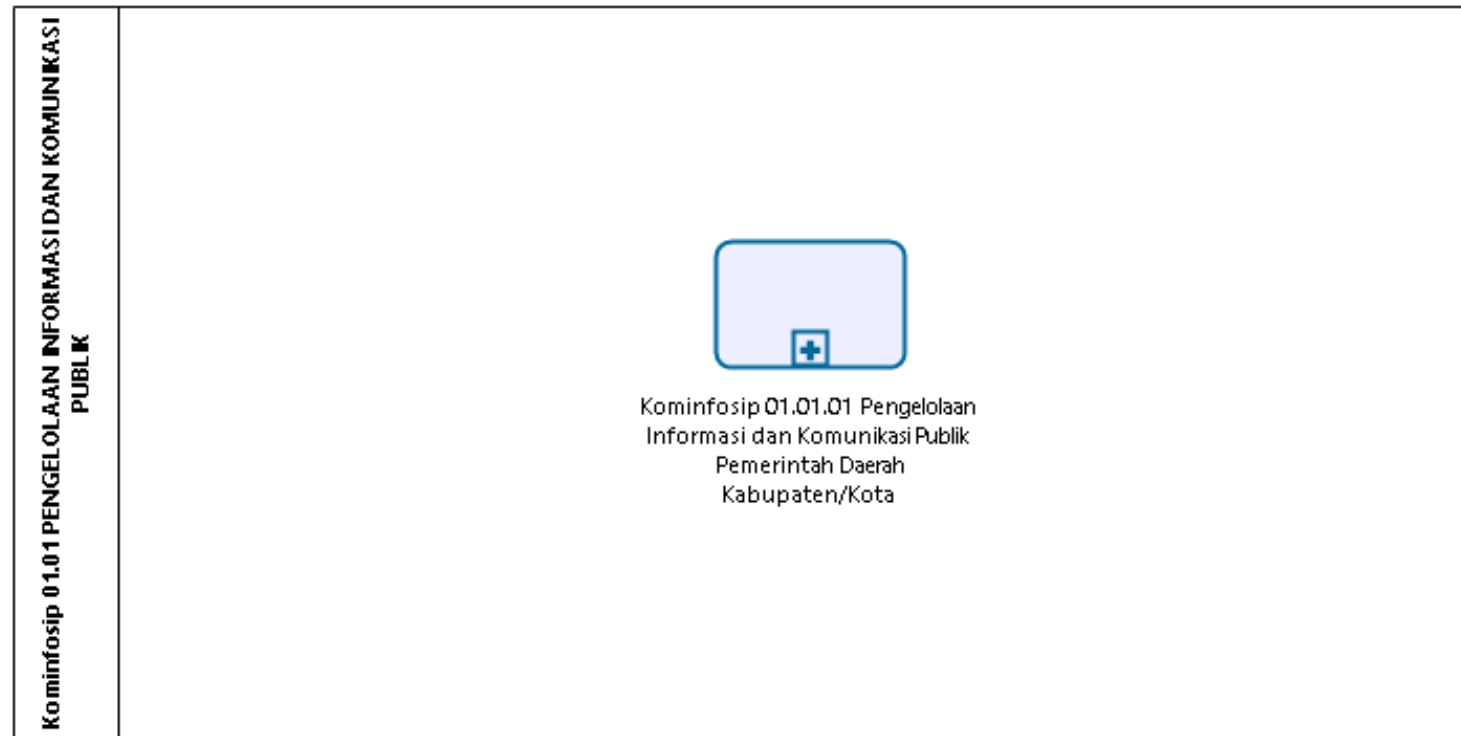
1 PETA INDUK



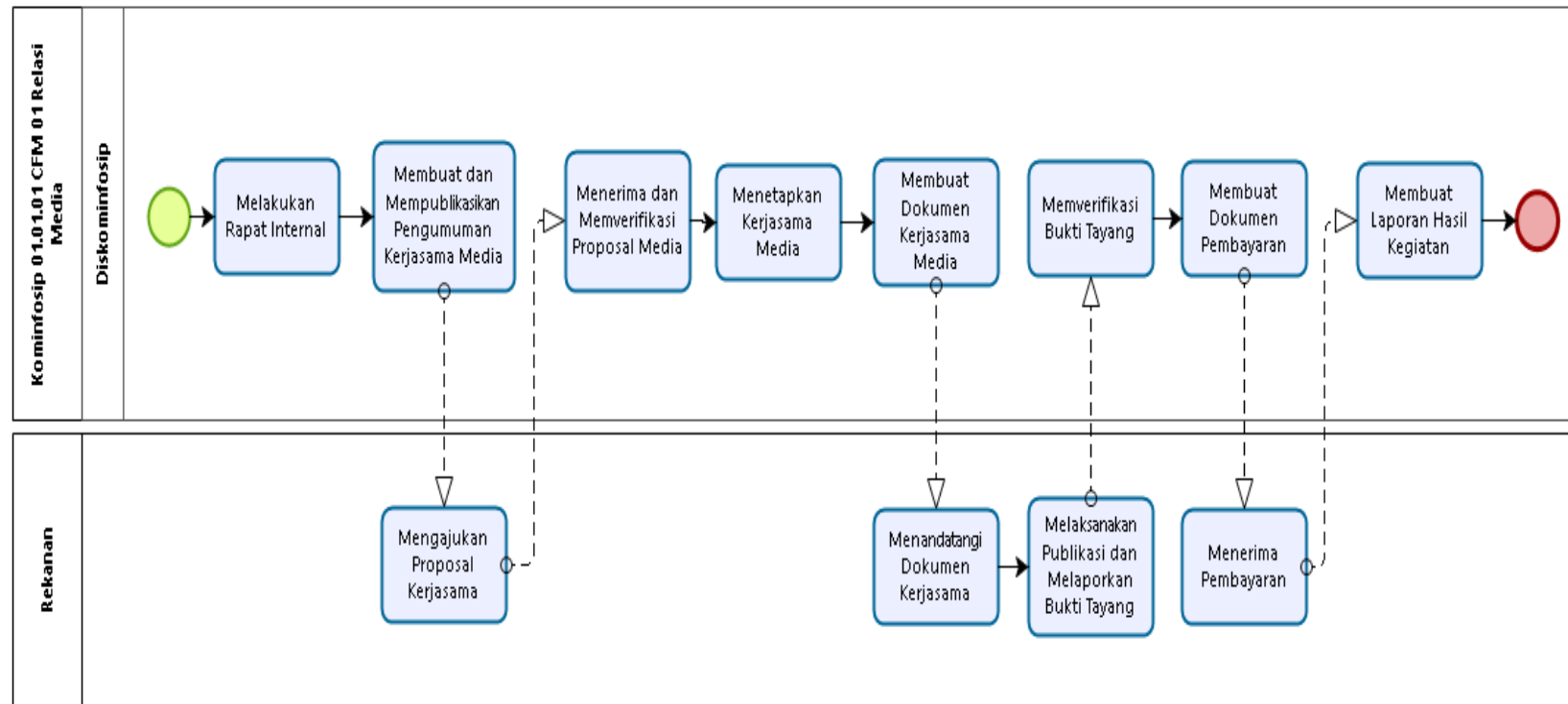
2 SASARAN 01



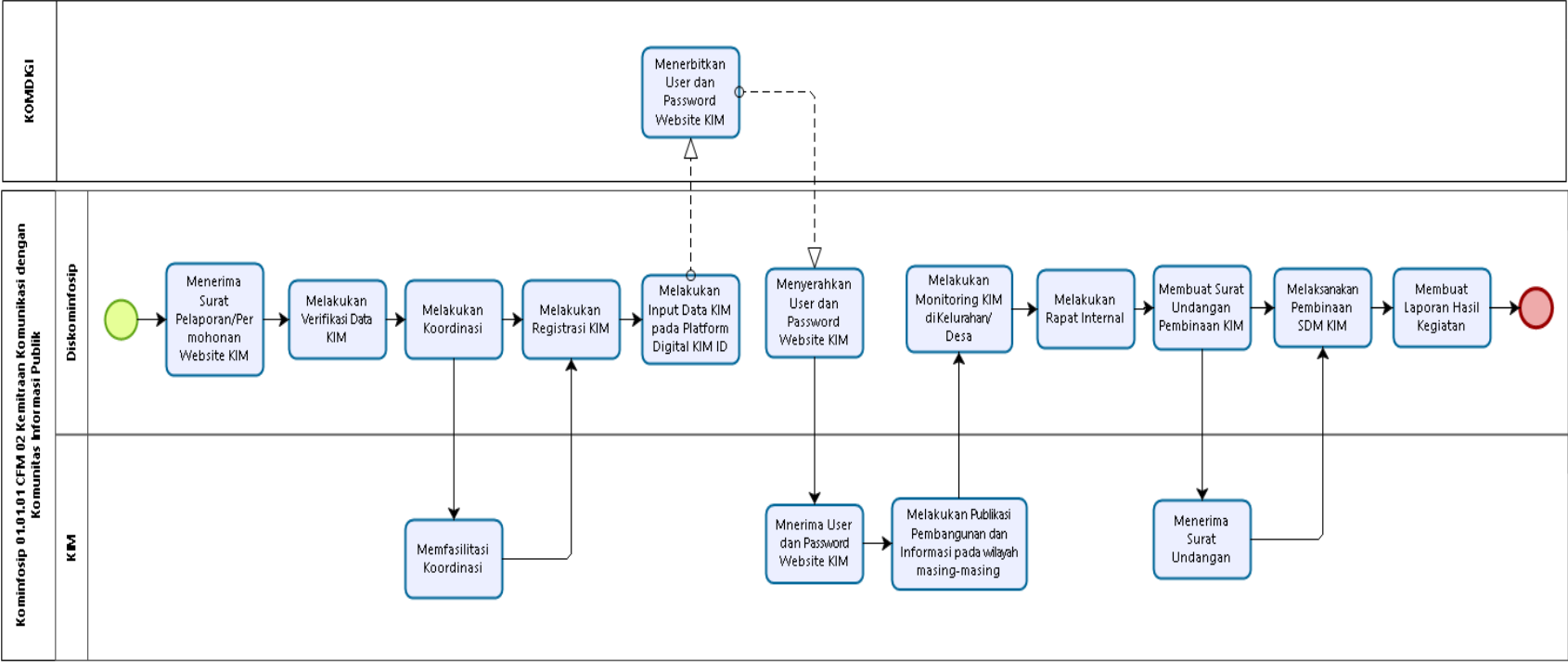
3 Kominfosip 01.01



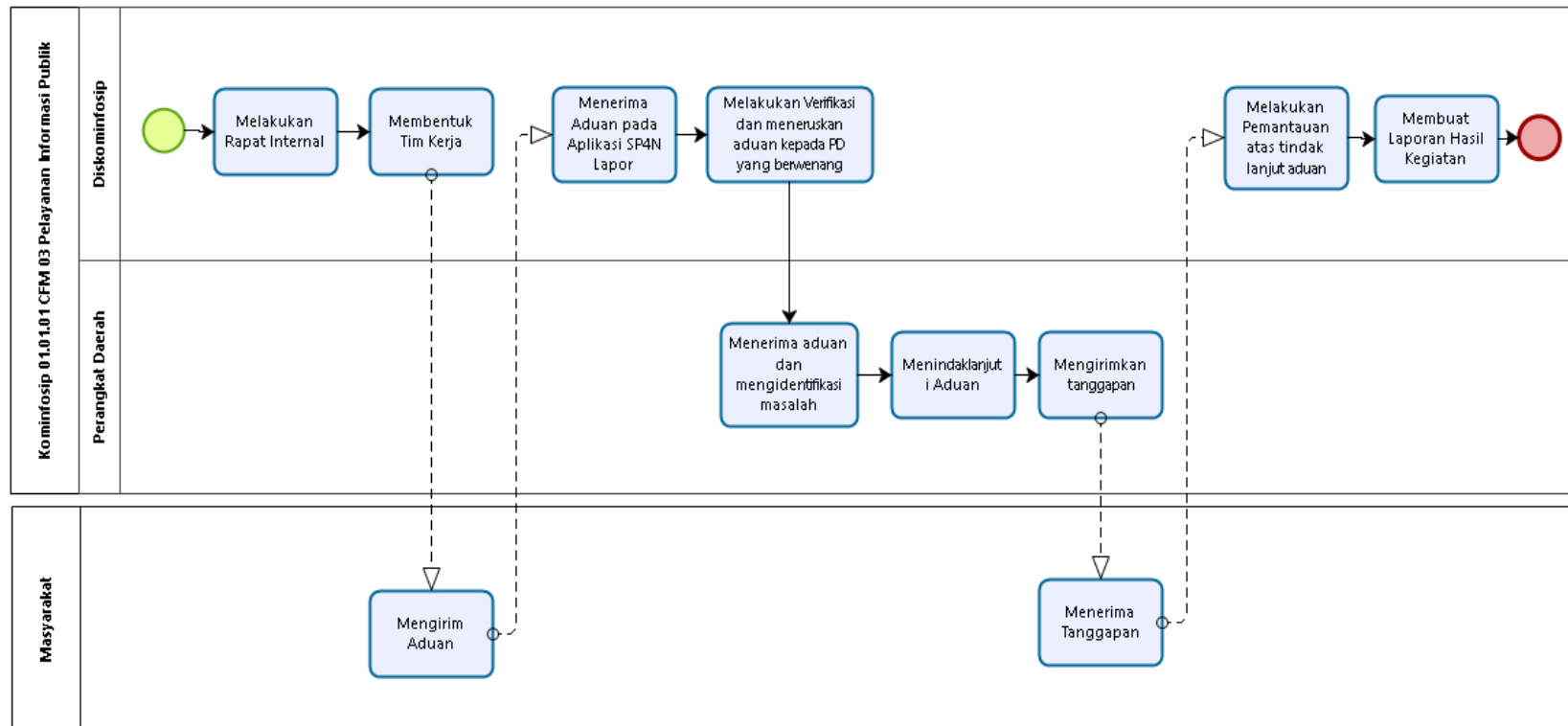
4 Kominfosip 01.01.01 CFM 01



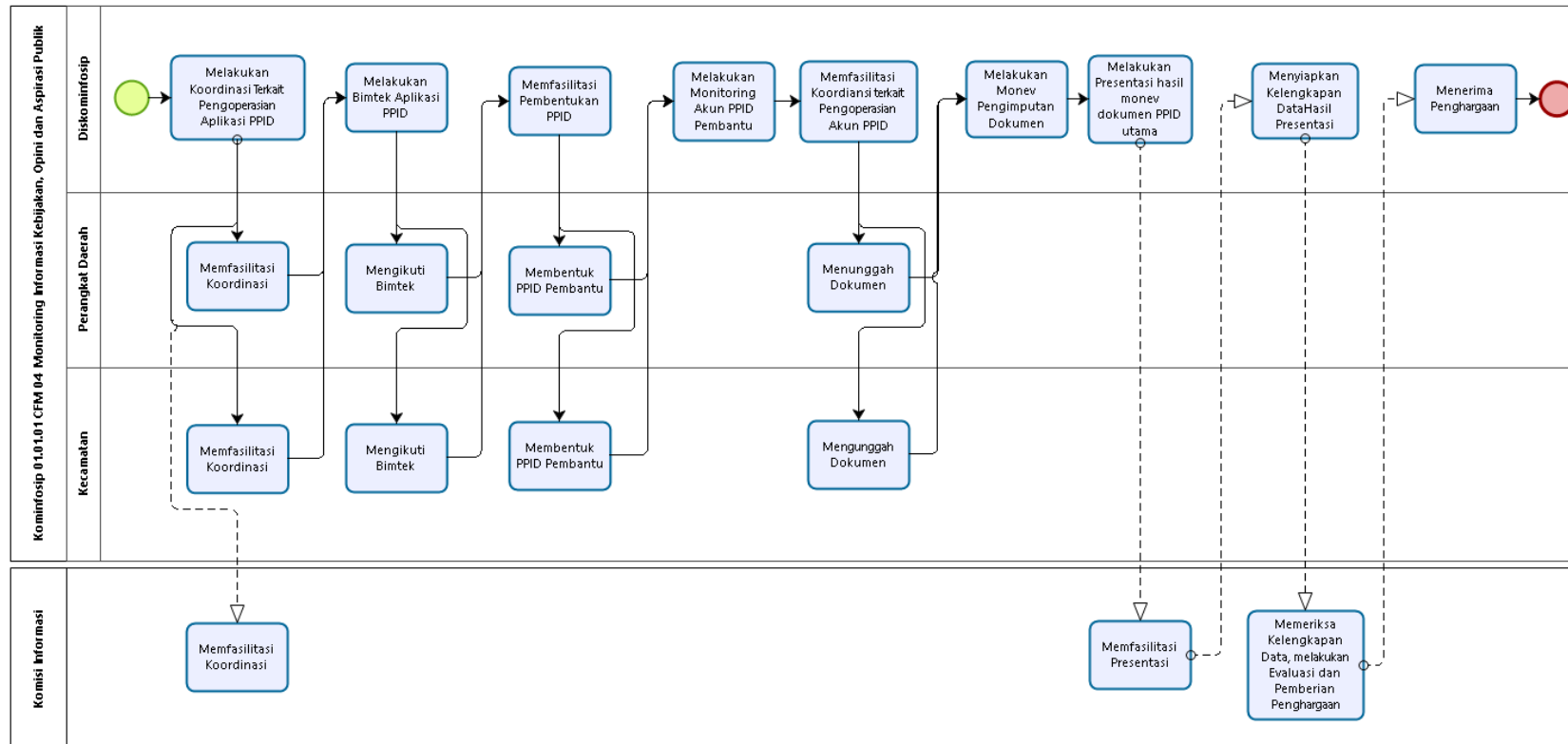
5 Kominfosip 01.01.01 CFM 02



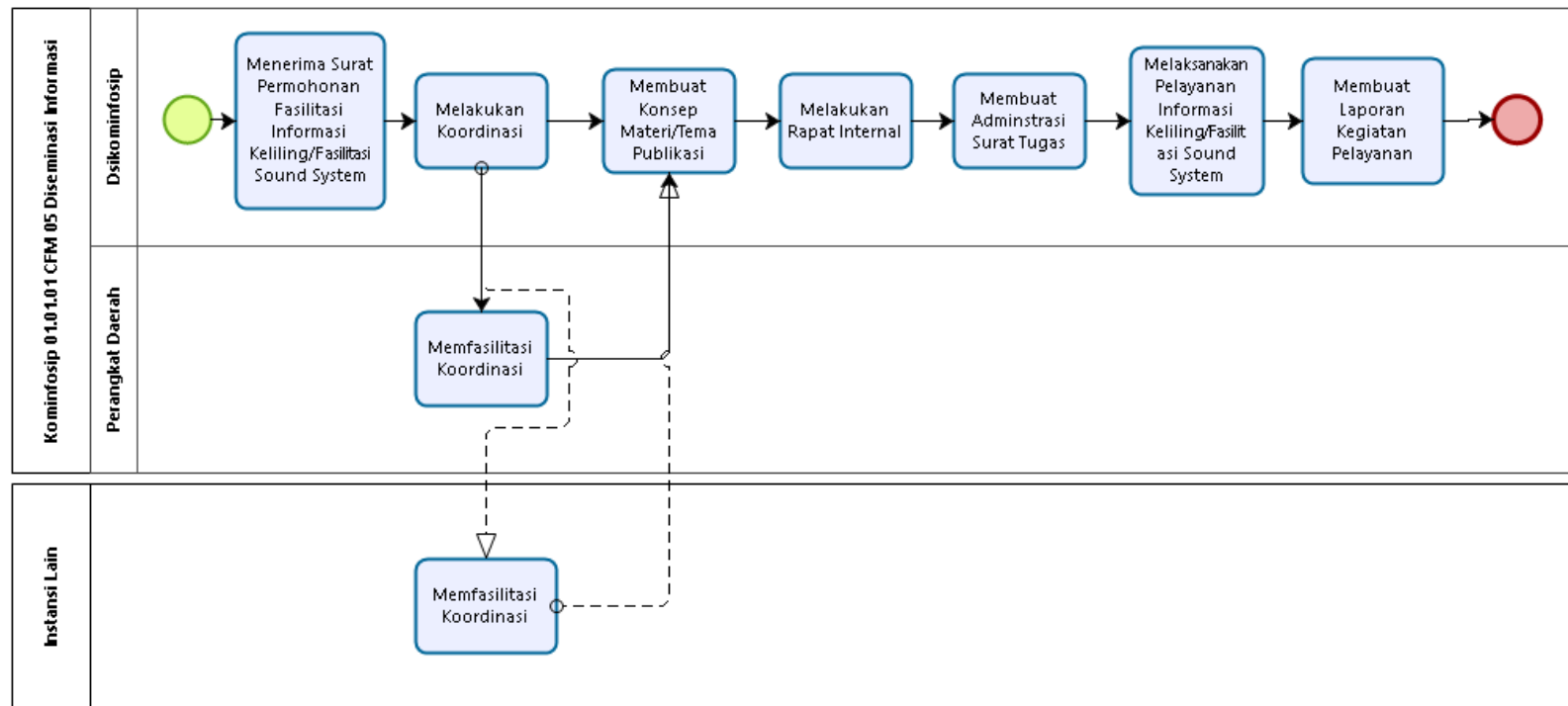
6 Kominfosip 01.01.01 CFM 03



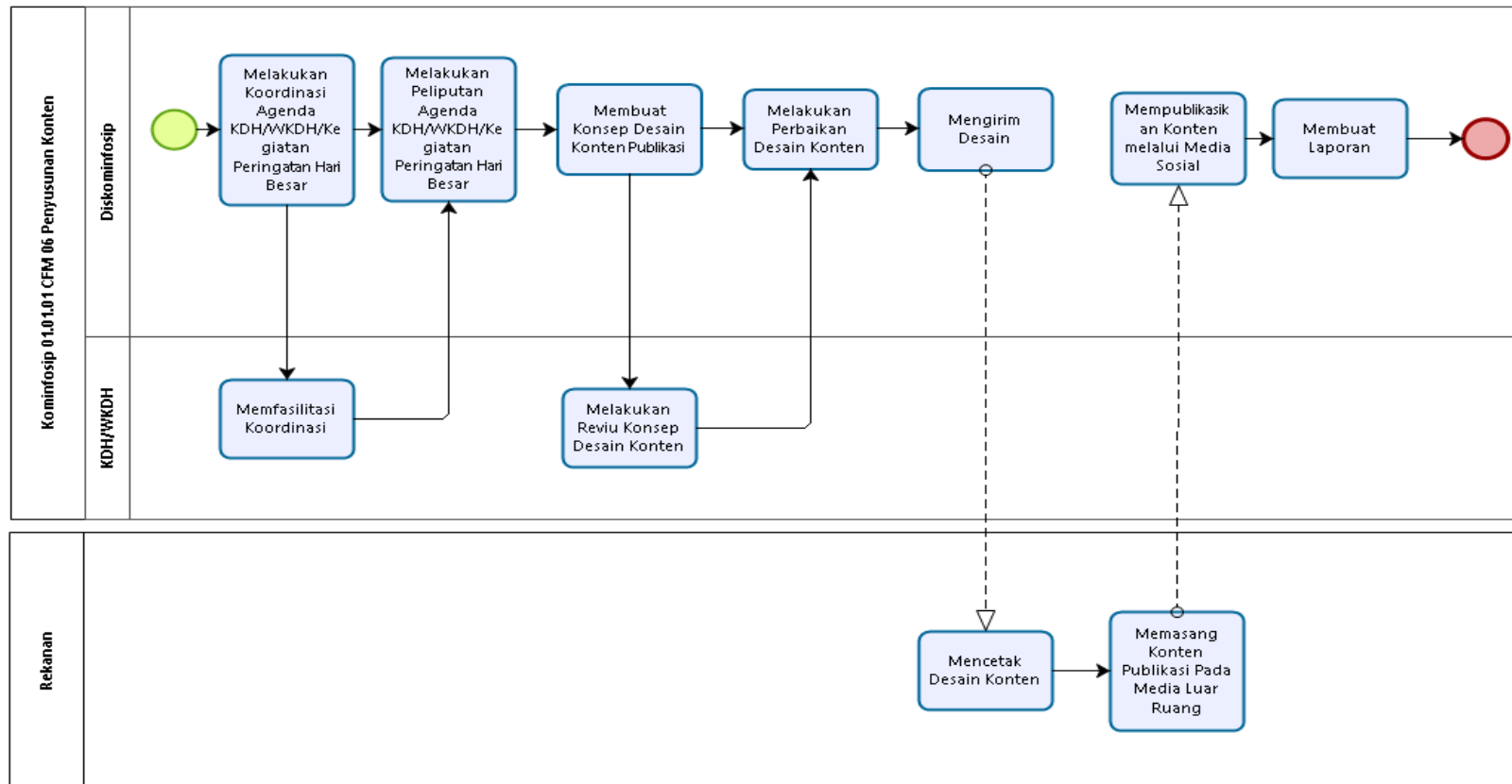
7 Kominfosip 01.01.01 CFM 04



8 Kominfosip 01.01.01 CFM 05



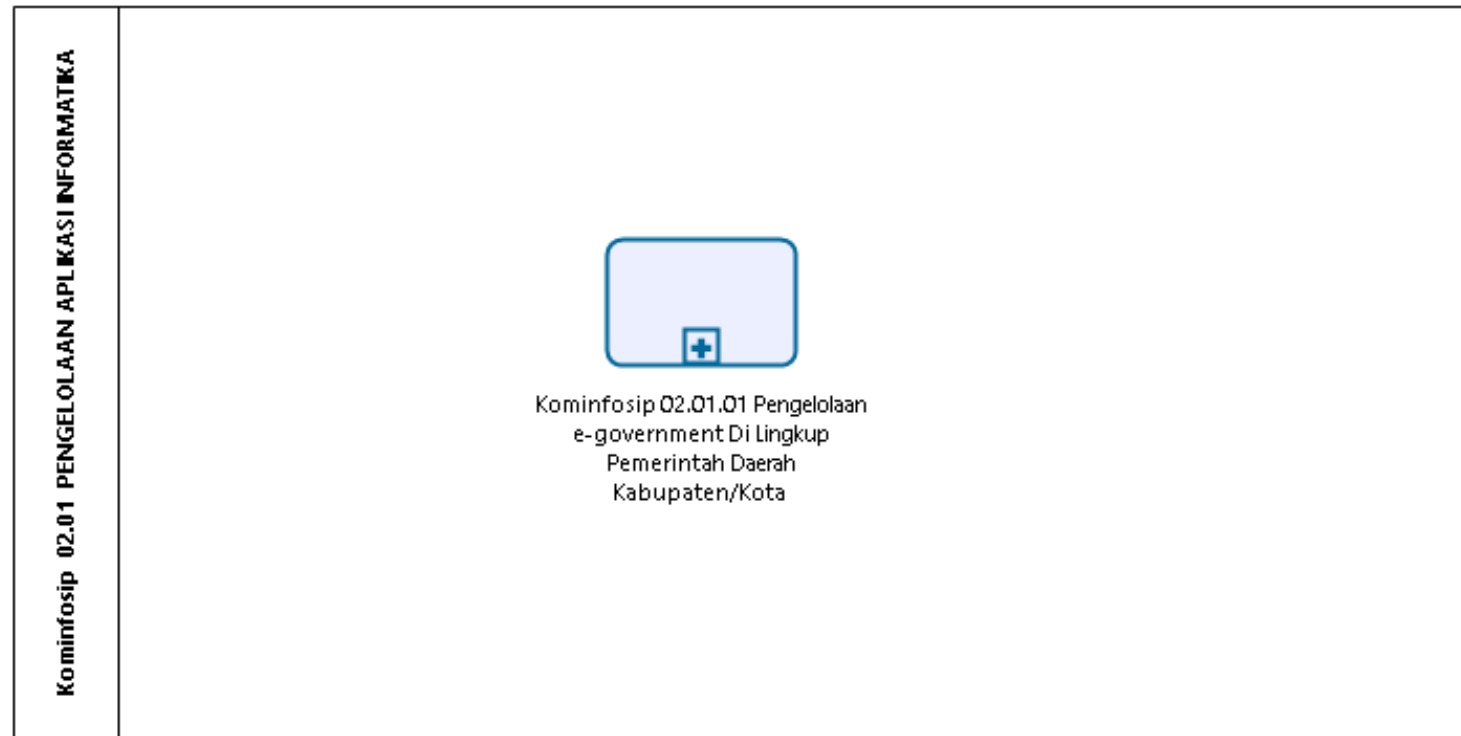
9 Kominfosip 01.01.01 CFM 06



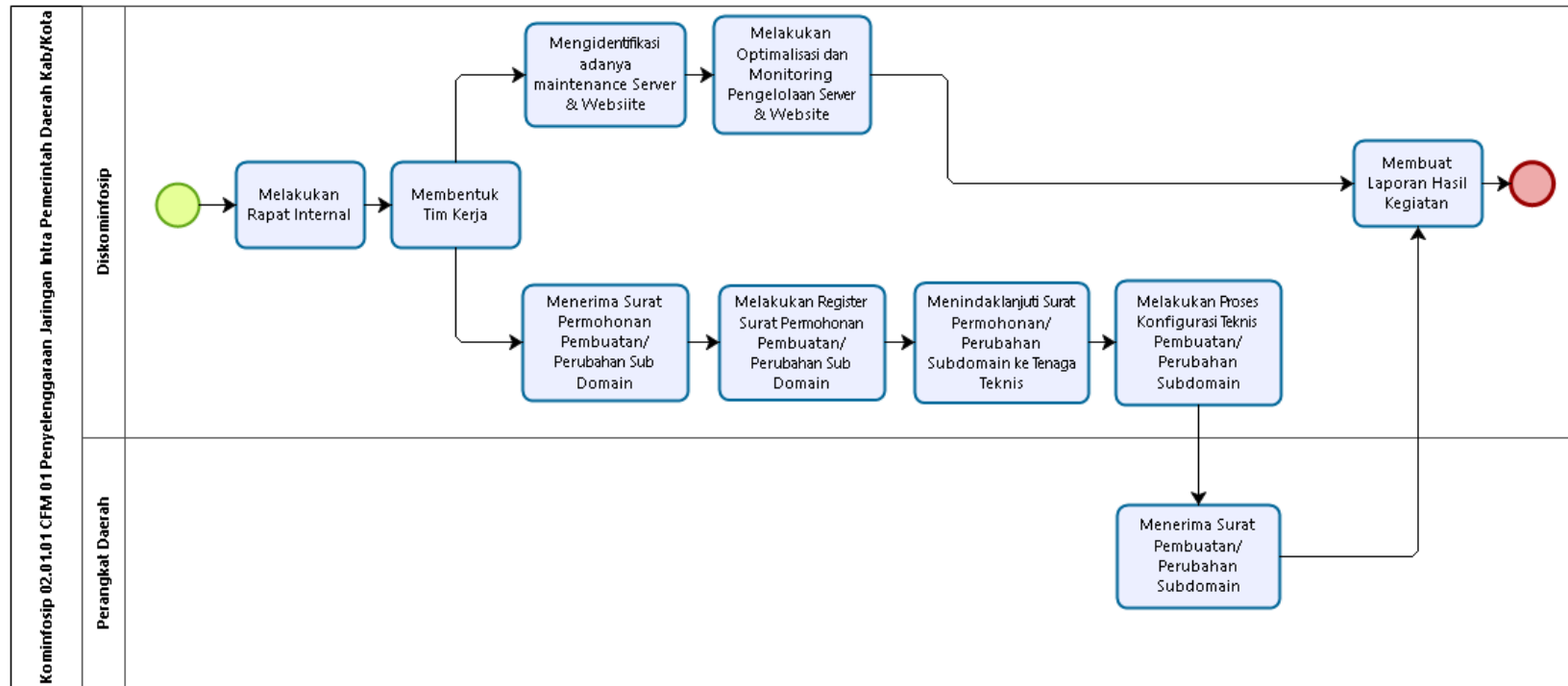
10 SASARAN 02



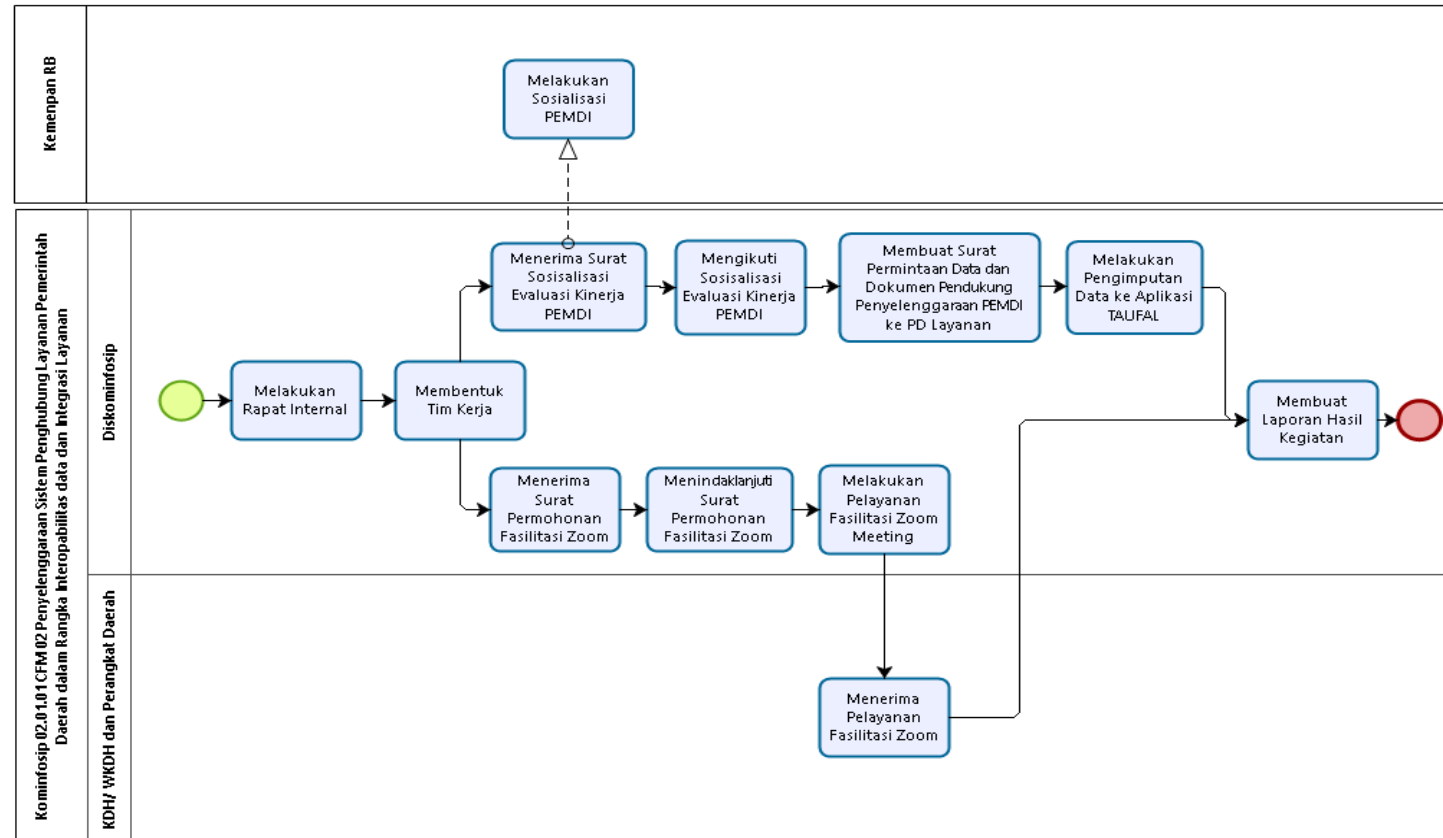
11 Kominfosip 02.01



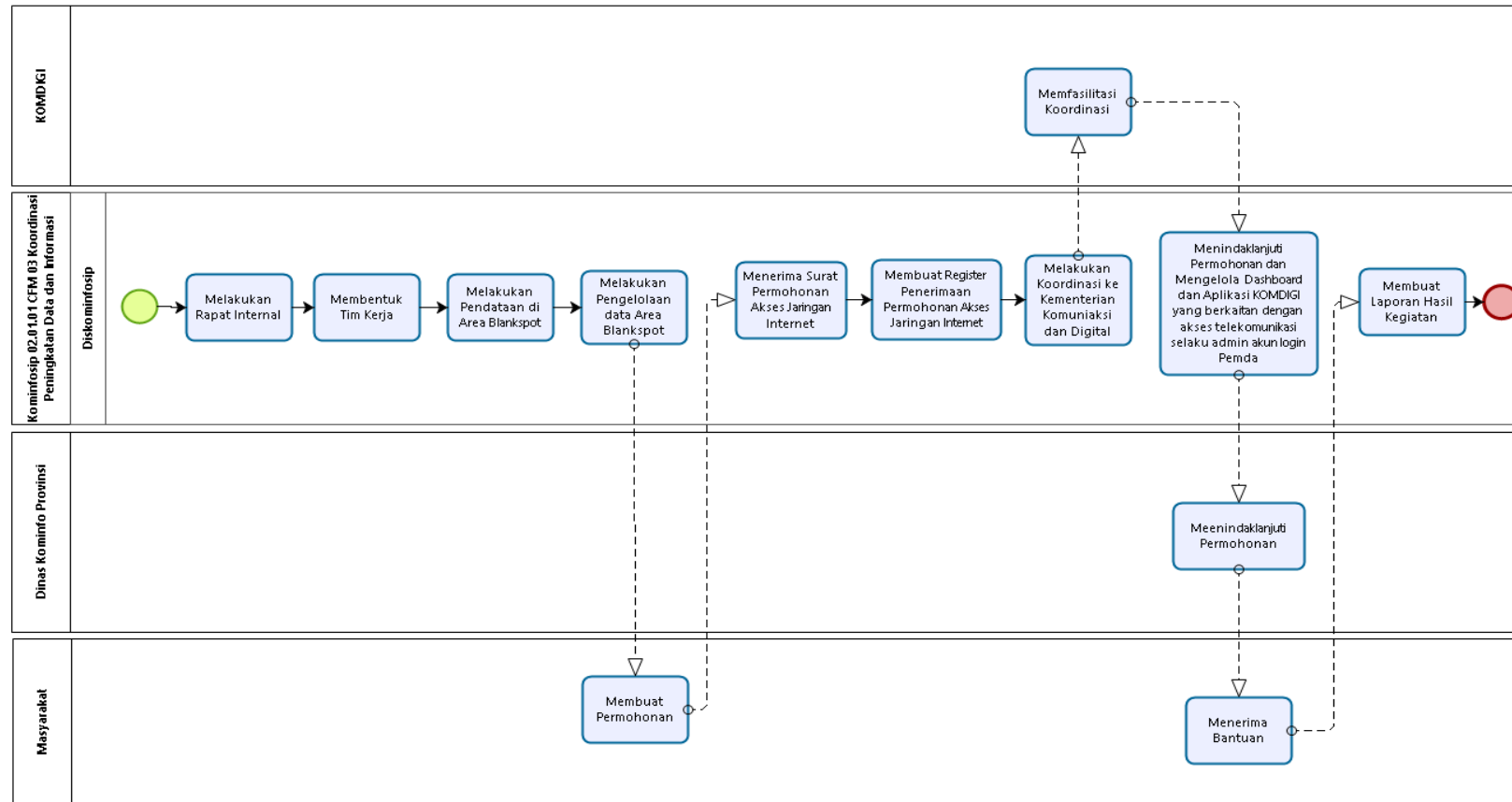
12 Kominfosip 02.01.01 CFM 01



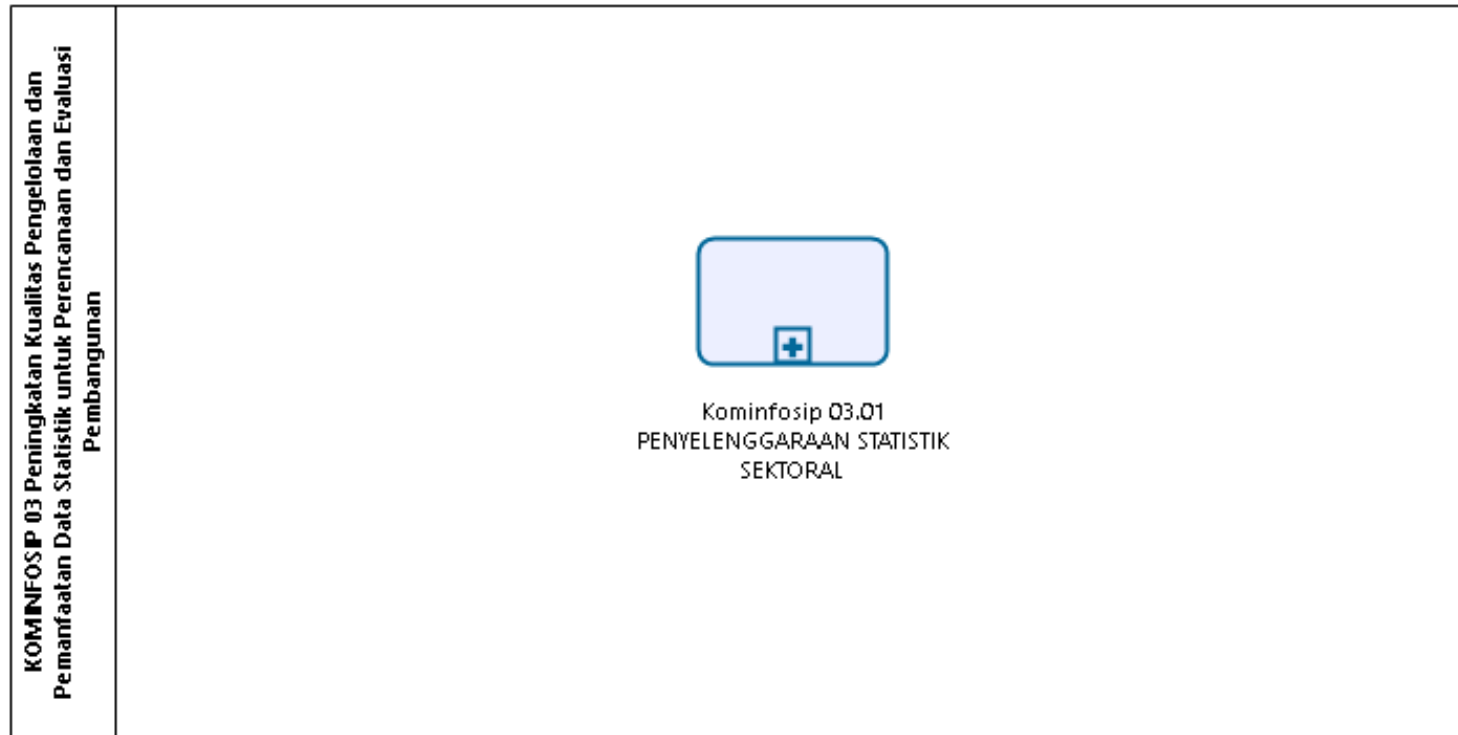
13 Kominfosip 02.01.01 CFM 02



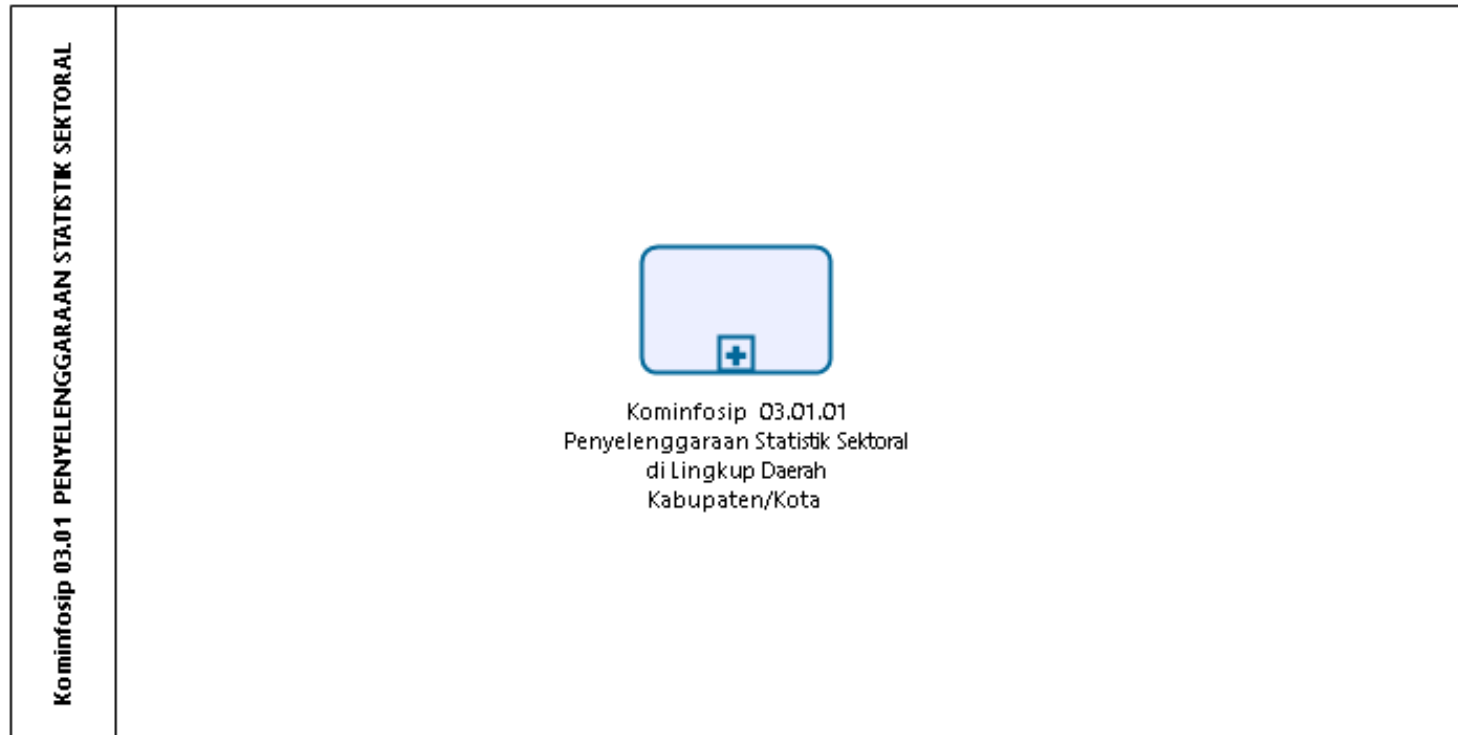
14 Kominfosip 02.01.01 CFM 03



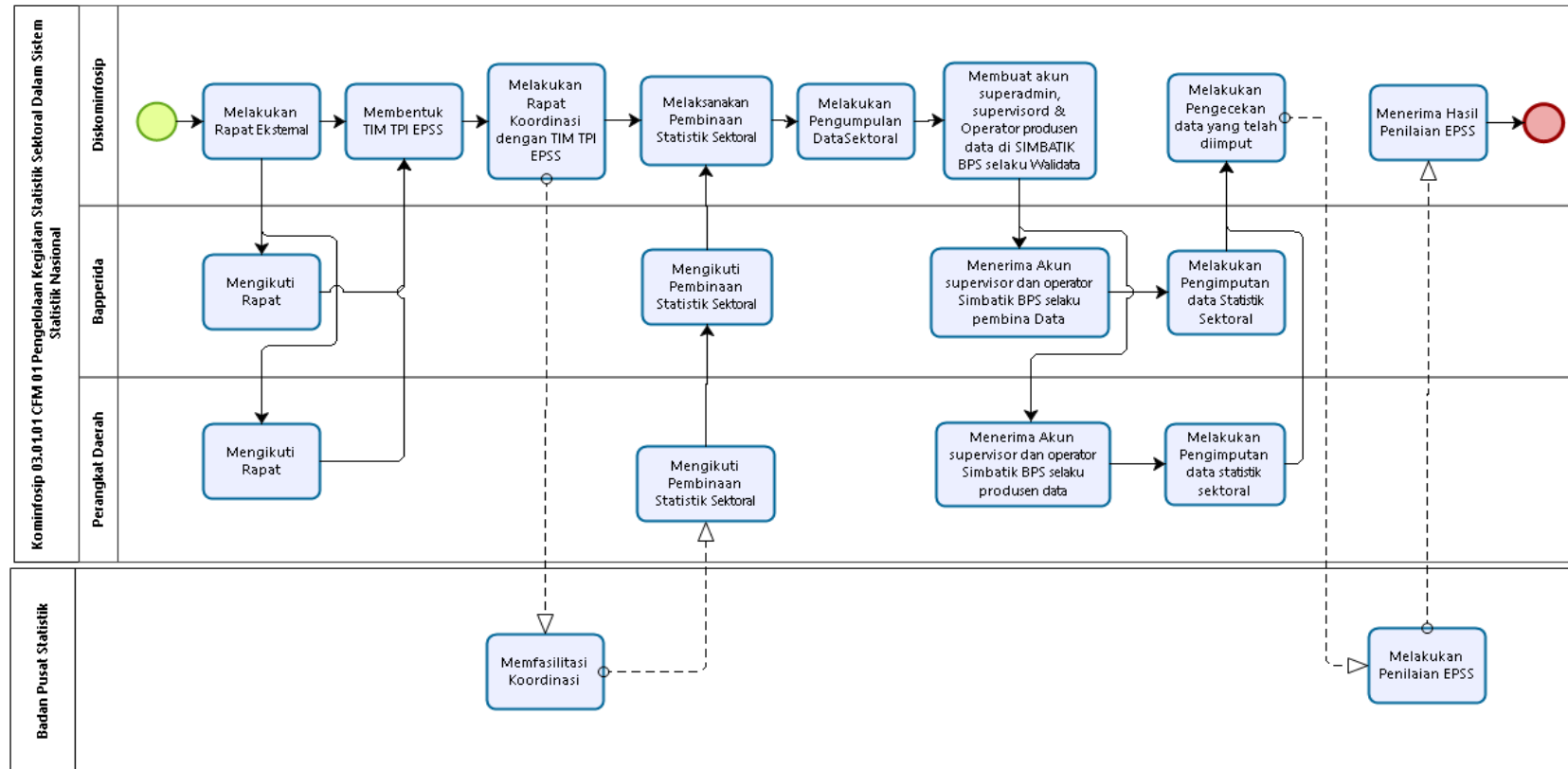
15 SASARAN 03



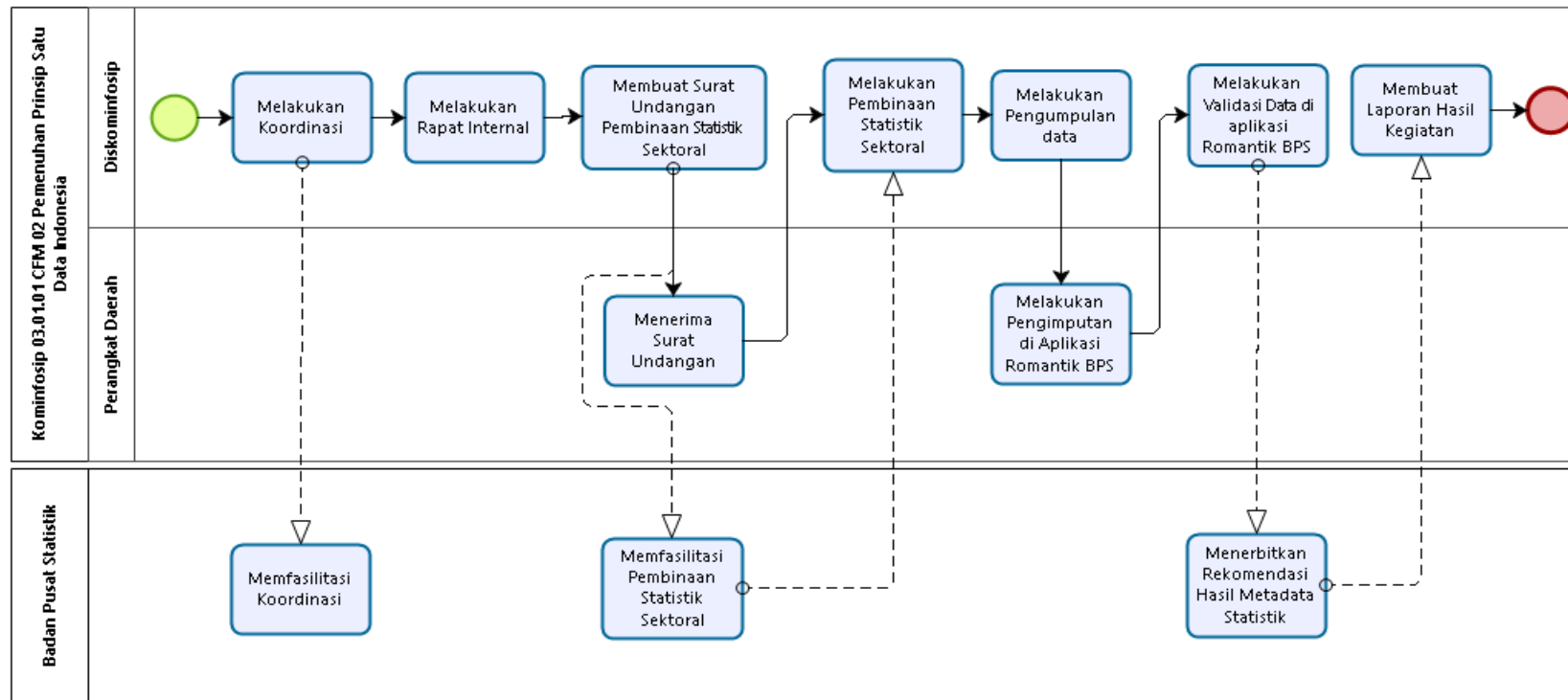
16 Kominfosip 03.01



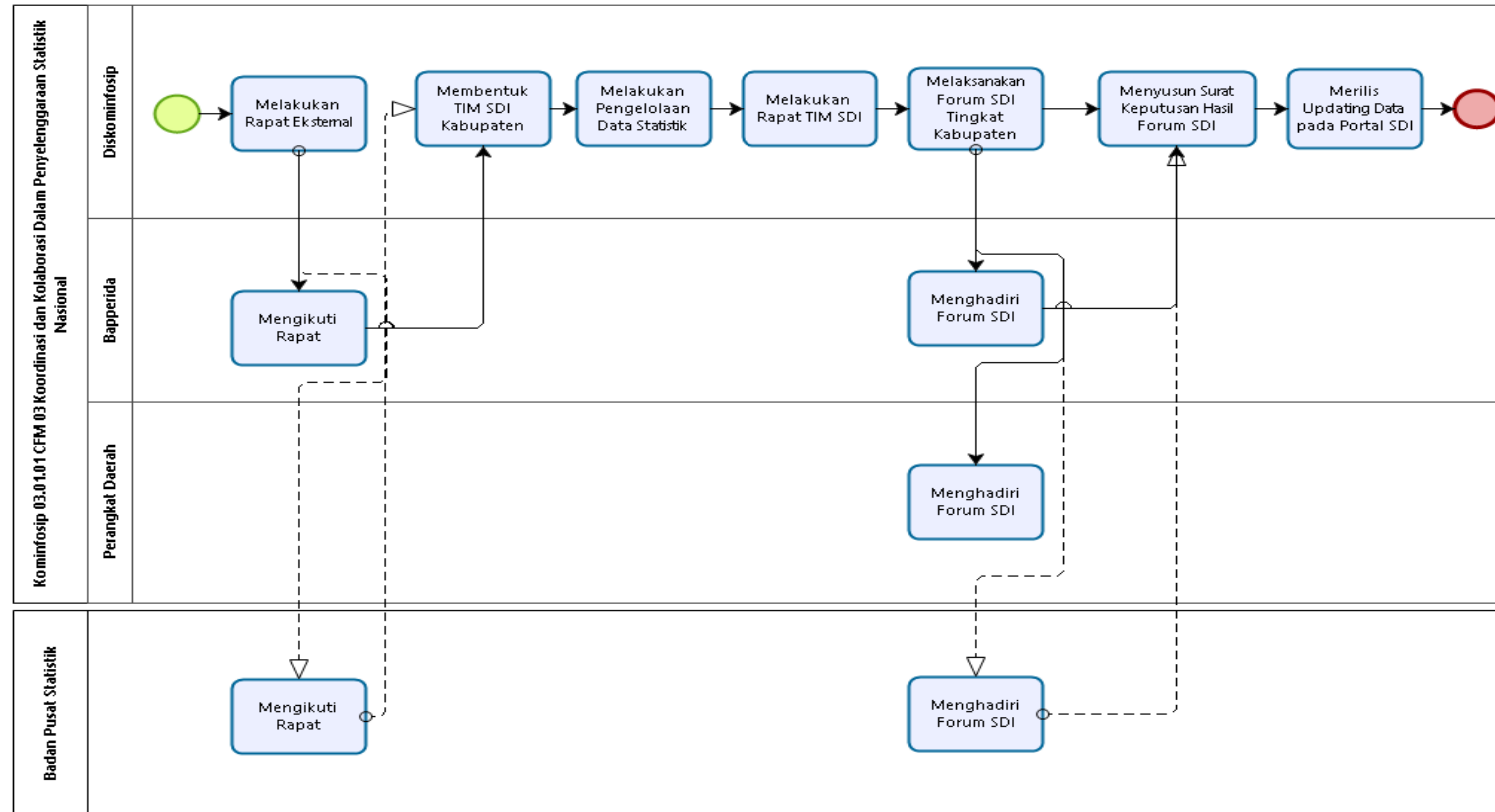
17 Kominfosip 03.01.01 CFM 01



18 Kominfosip 03.01.01 CFM 02



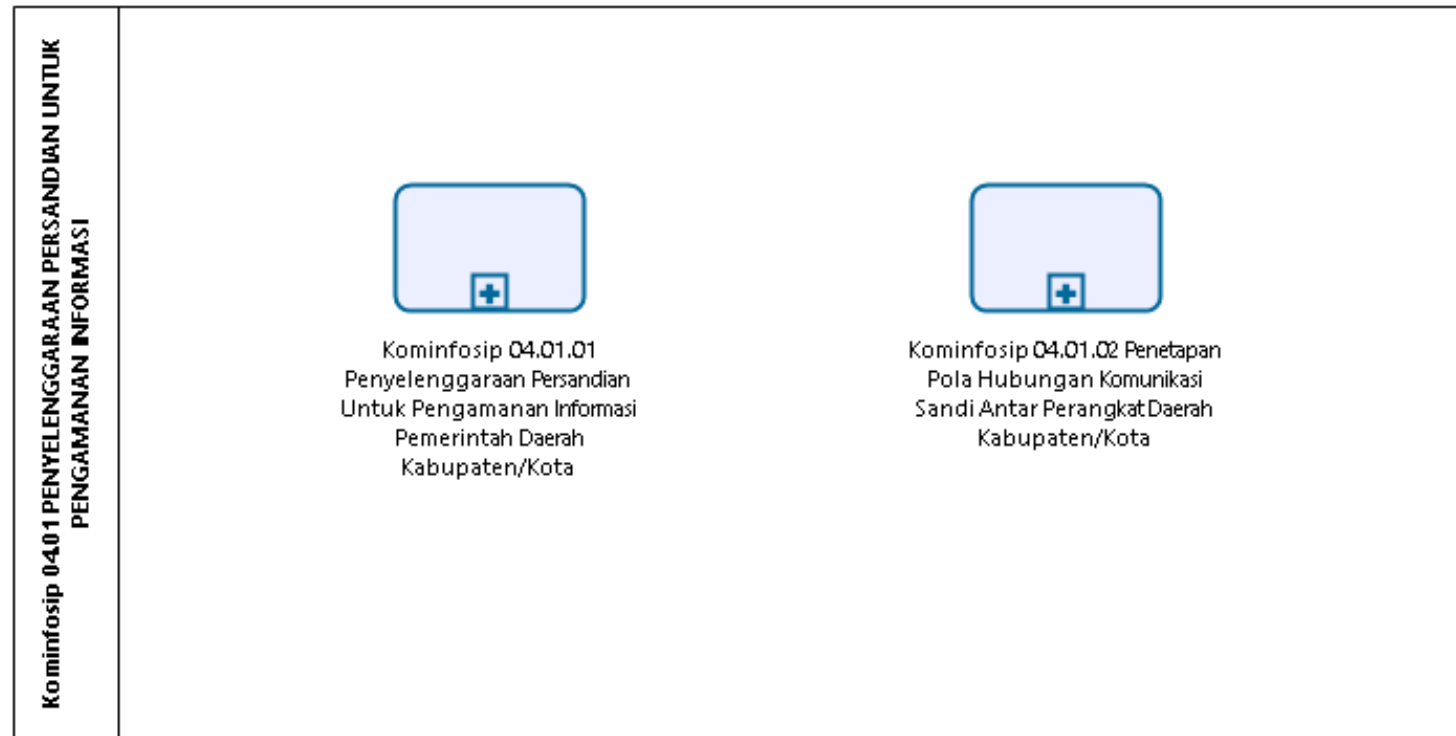
19 Kominfosip 03.01.01 CFM 03



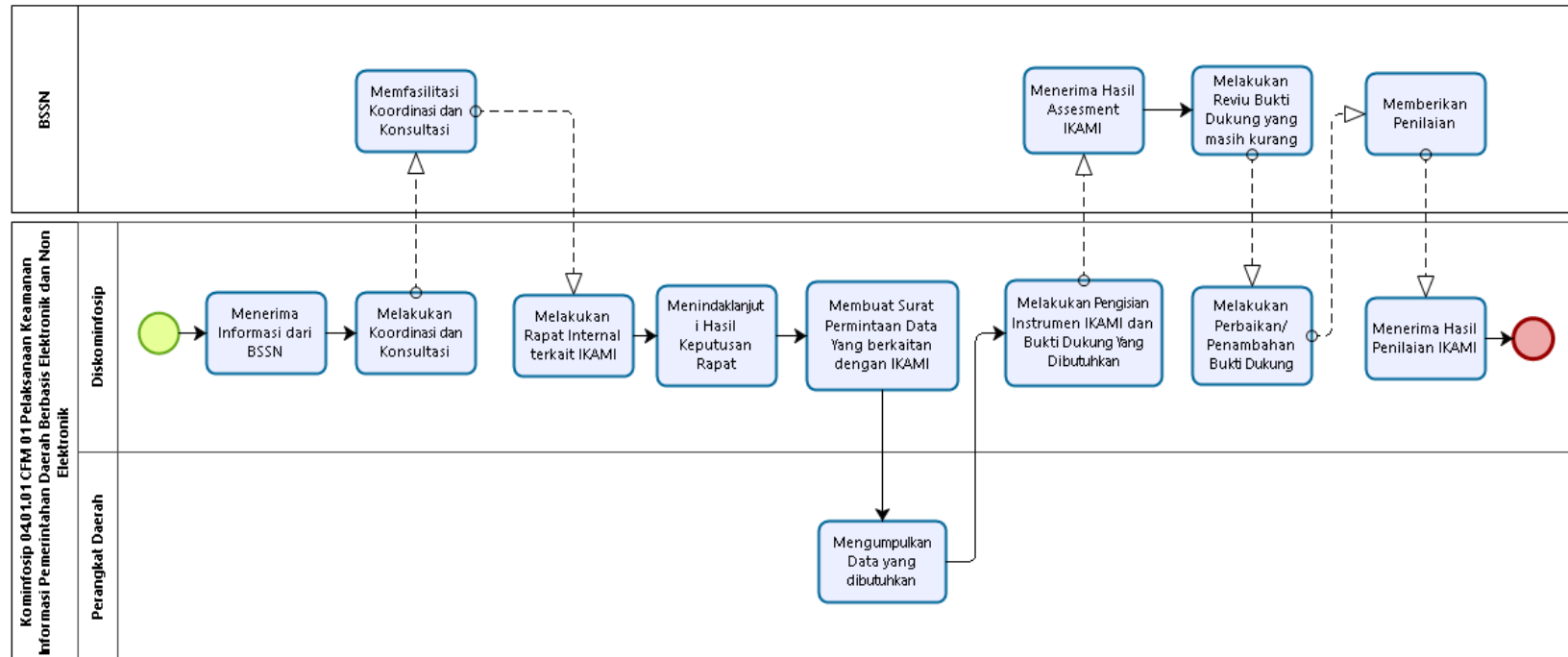
20 SASARAN 04

KOMINFOSP 04 Peningkatan Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah	 Kominfosip 04.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
--	---

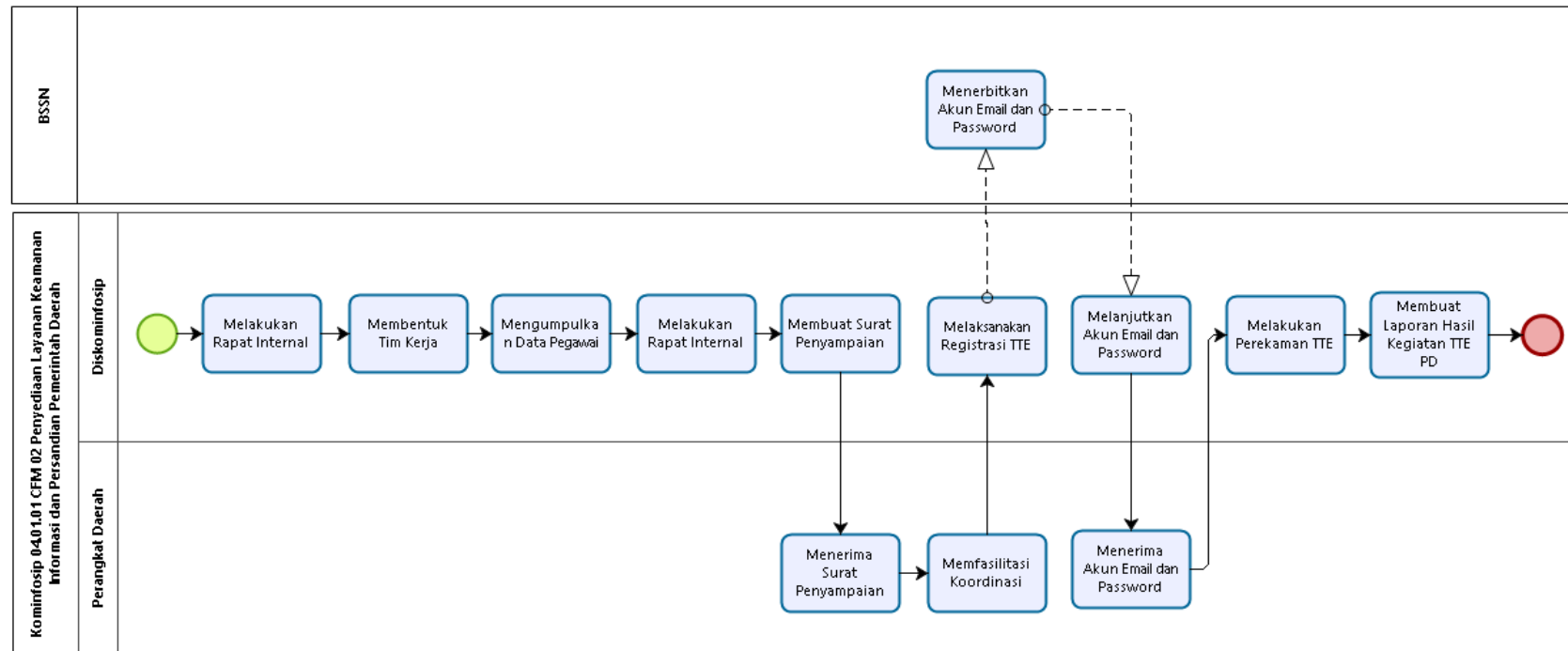
21 Kominfosip 04.01



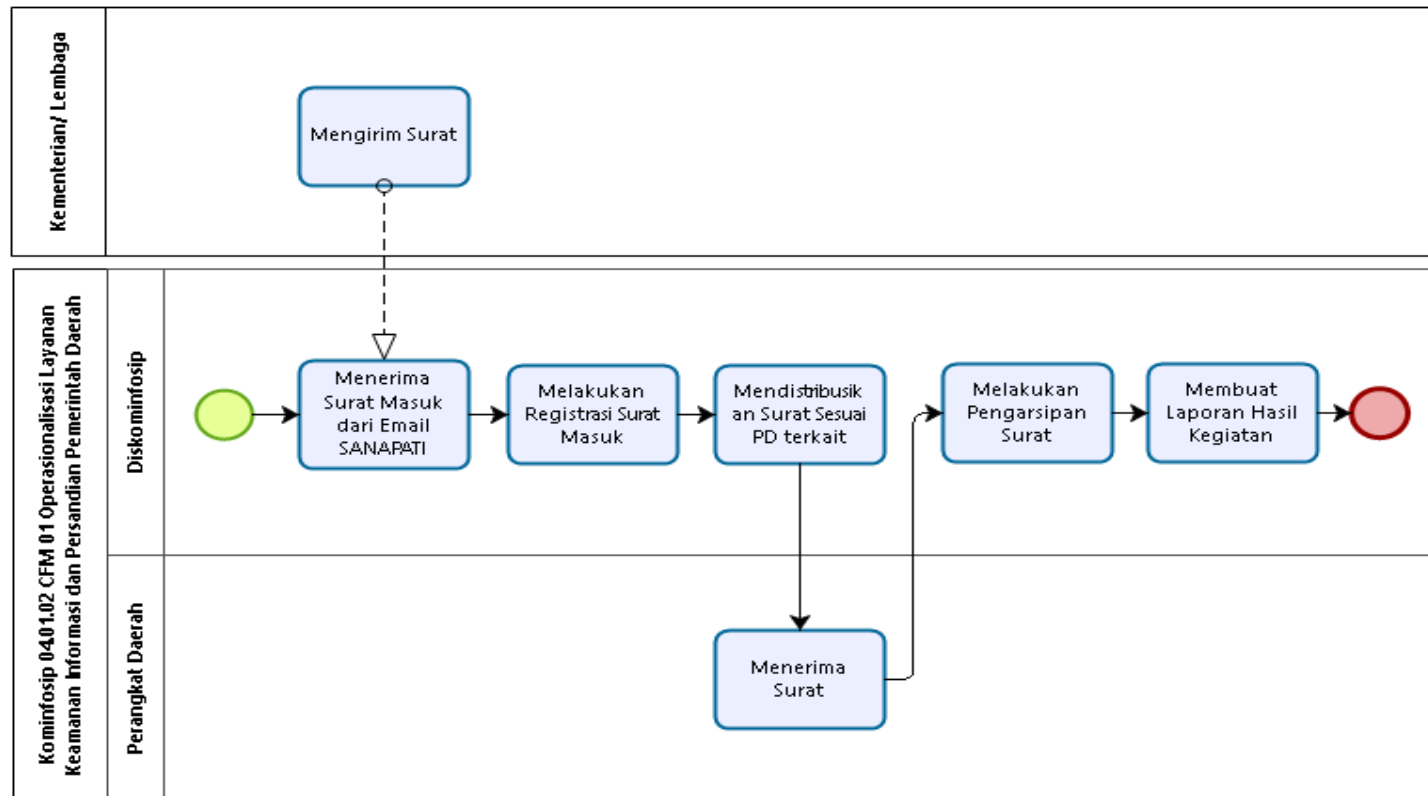
22 Kominfosip 04.01.01 CFM 01



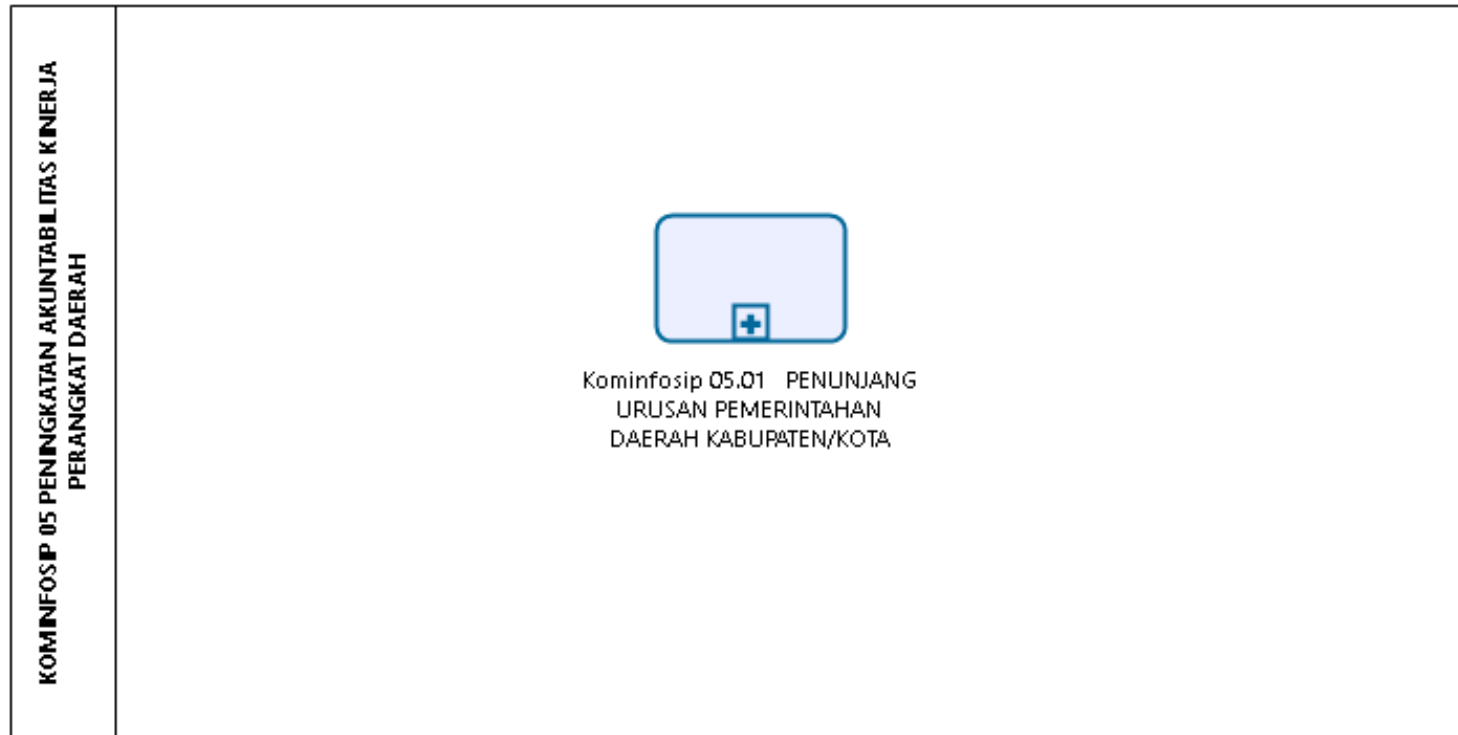
23 Kominfosip 04.01.01 CFM 02



24 Kominfosip 04.01.02 CFM 01



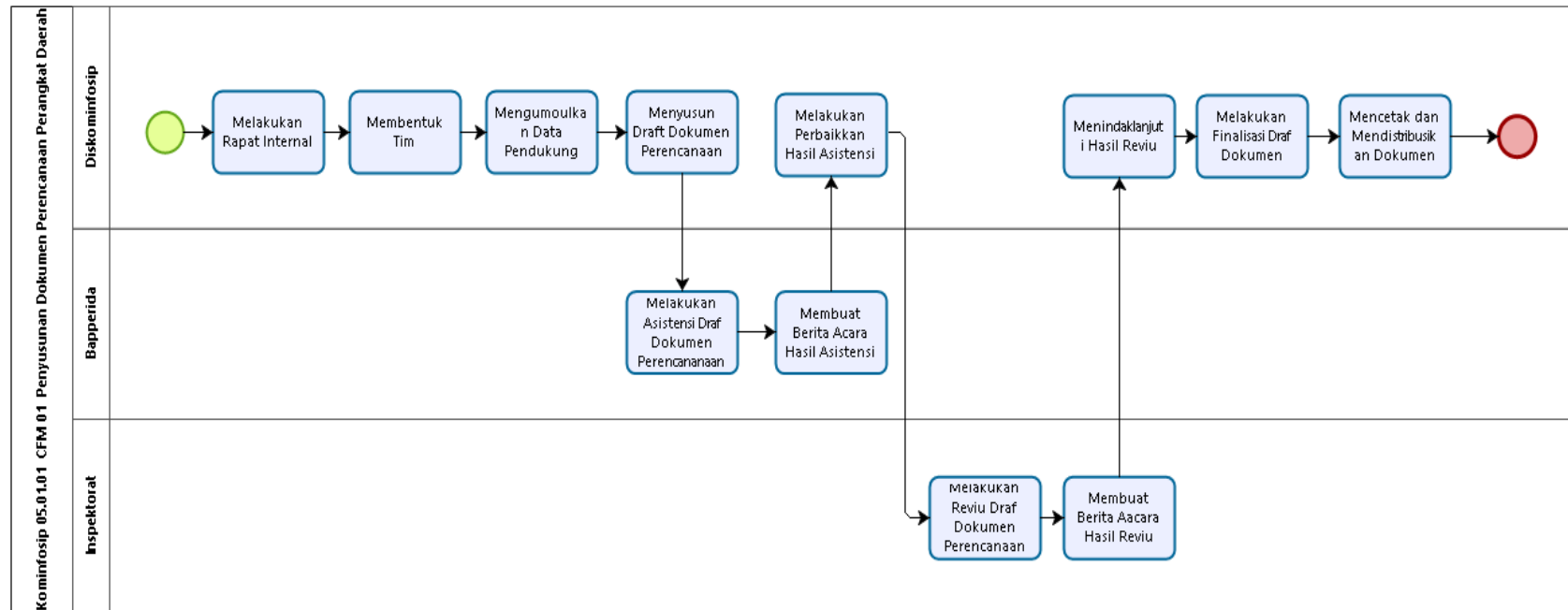
25 SASARAN 05



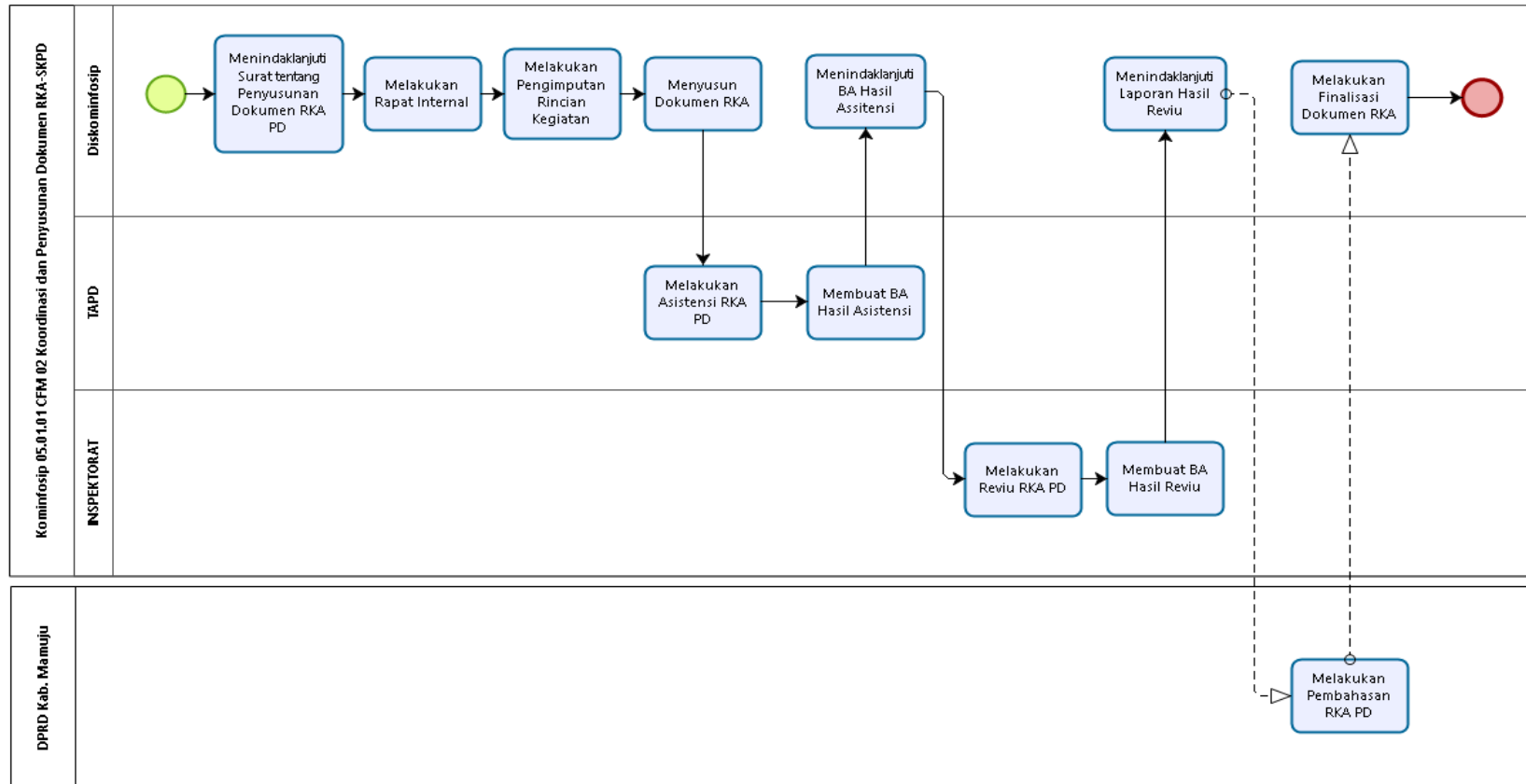
26 Kominfosip 05.01



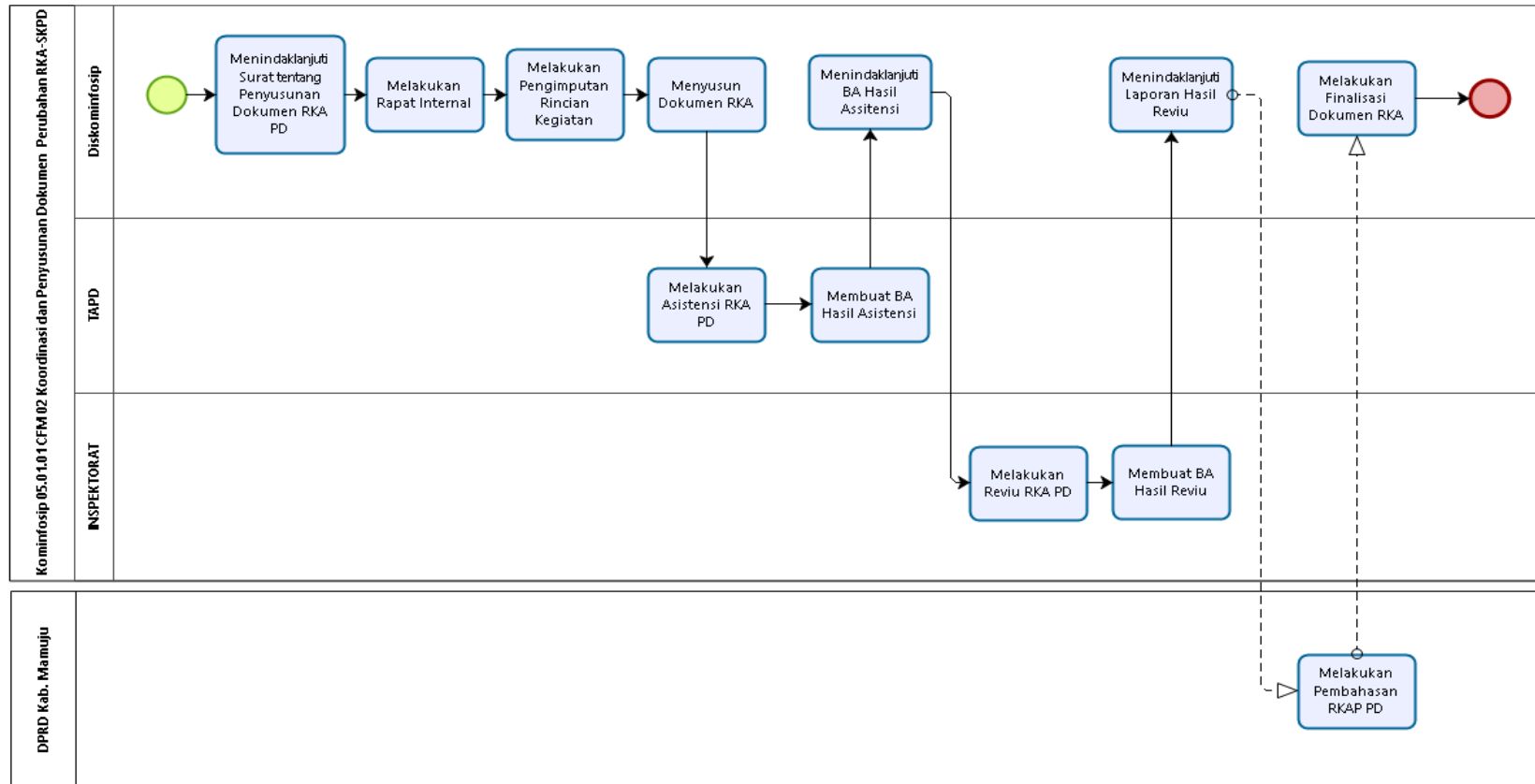
27 Kominfosip 05.01.01 CFM 01



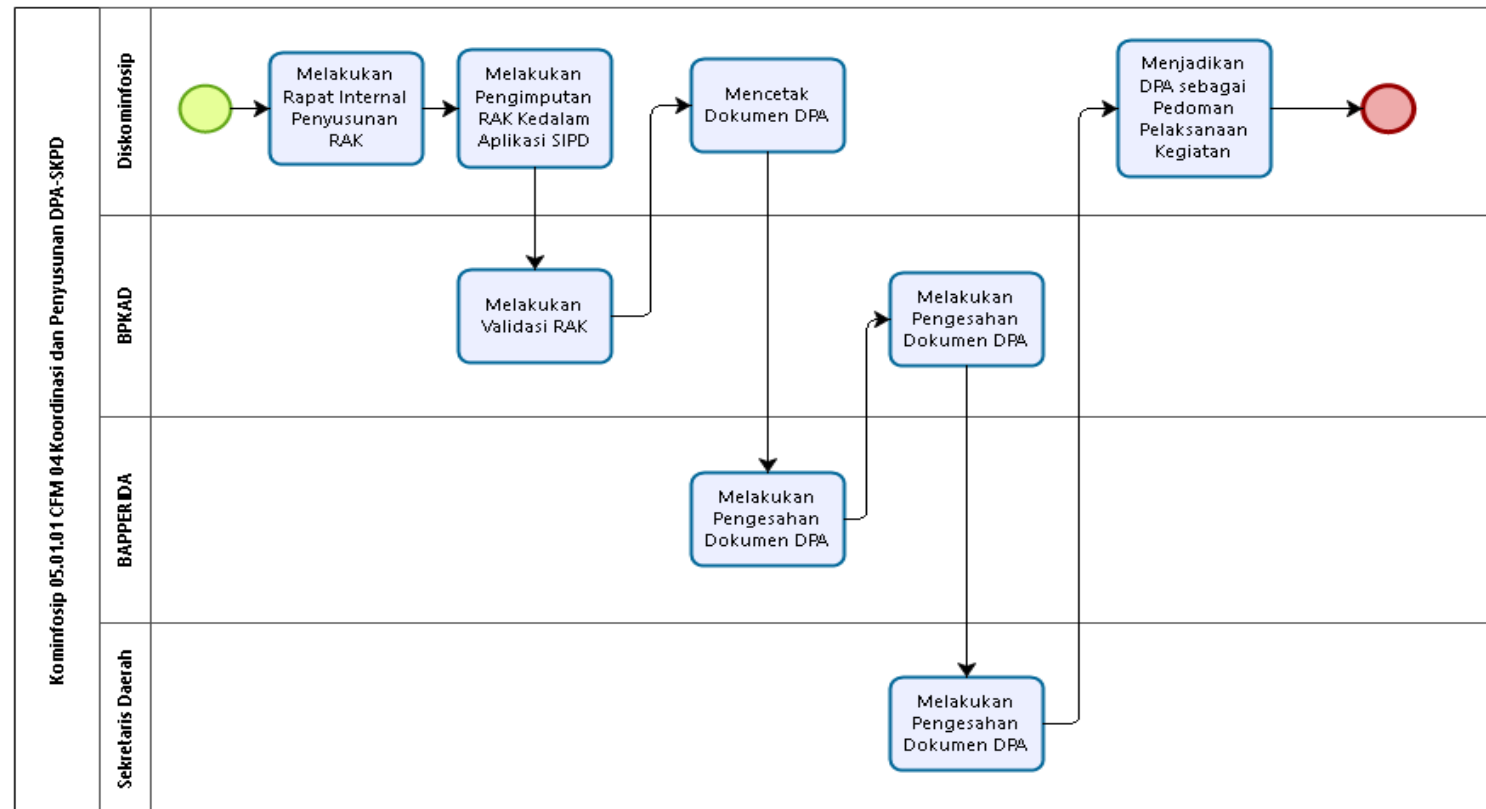
28 Kominfosip 05.01.01 CFM 02



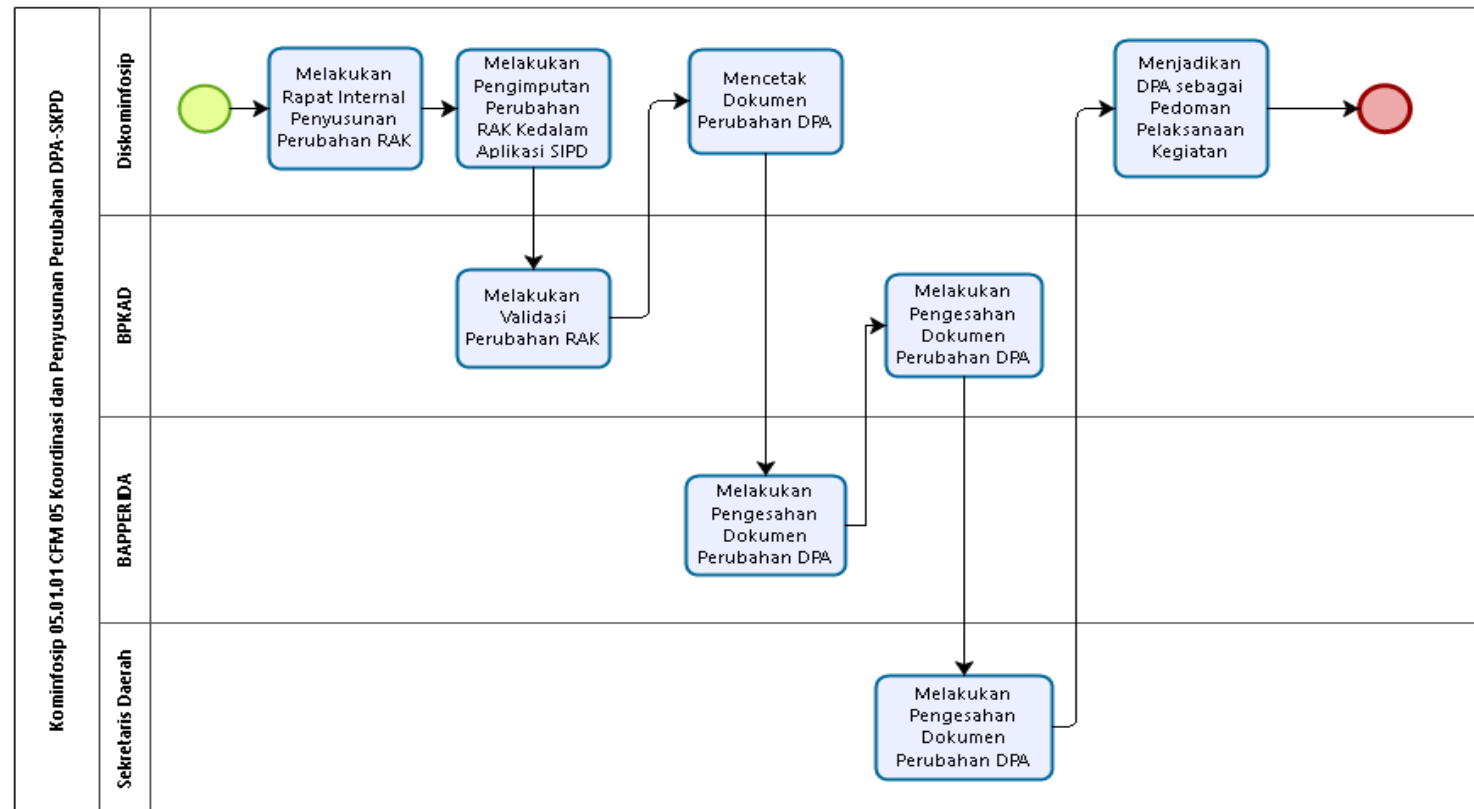
29 Kominfosip 05.01.01 CFM 03



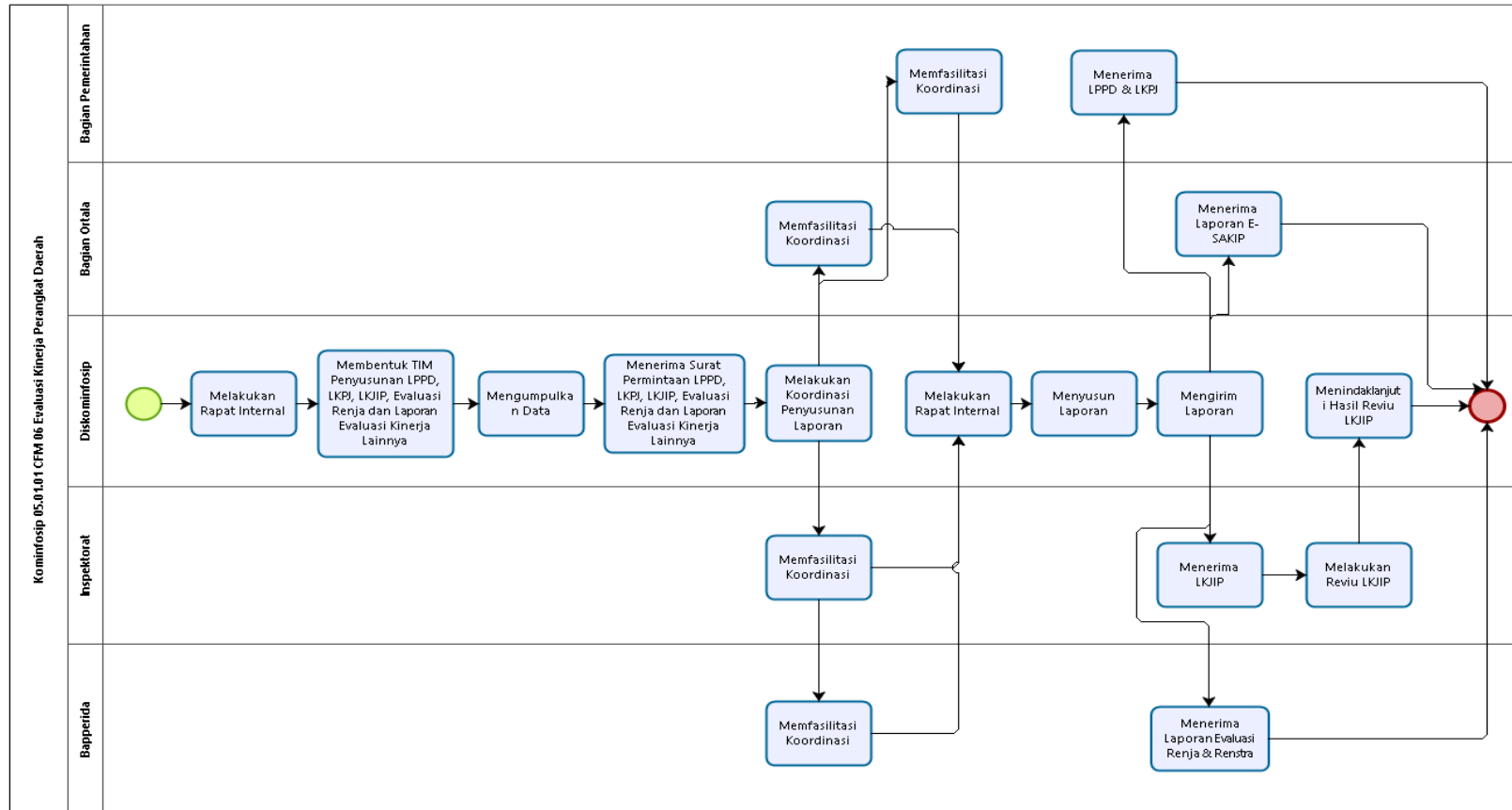
30 Kominfosip 05.01.01 CFM 04



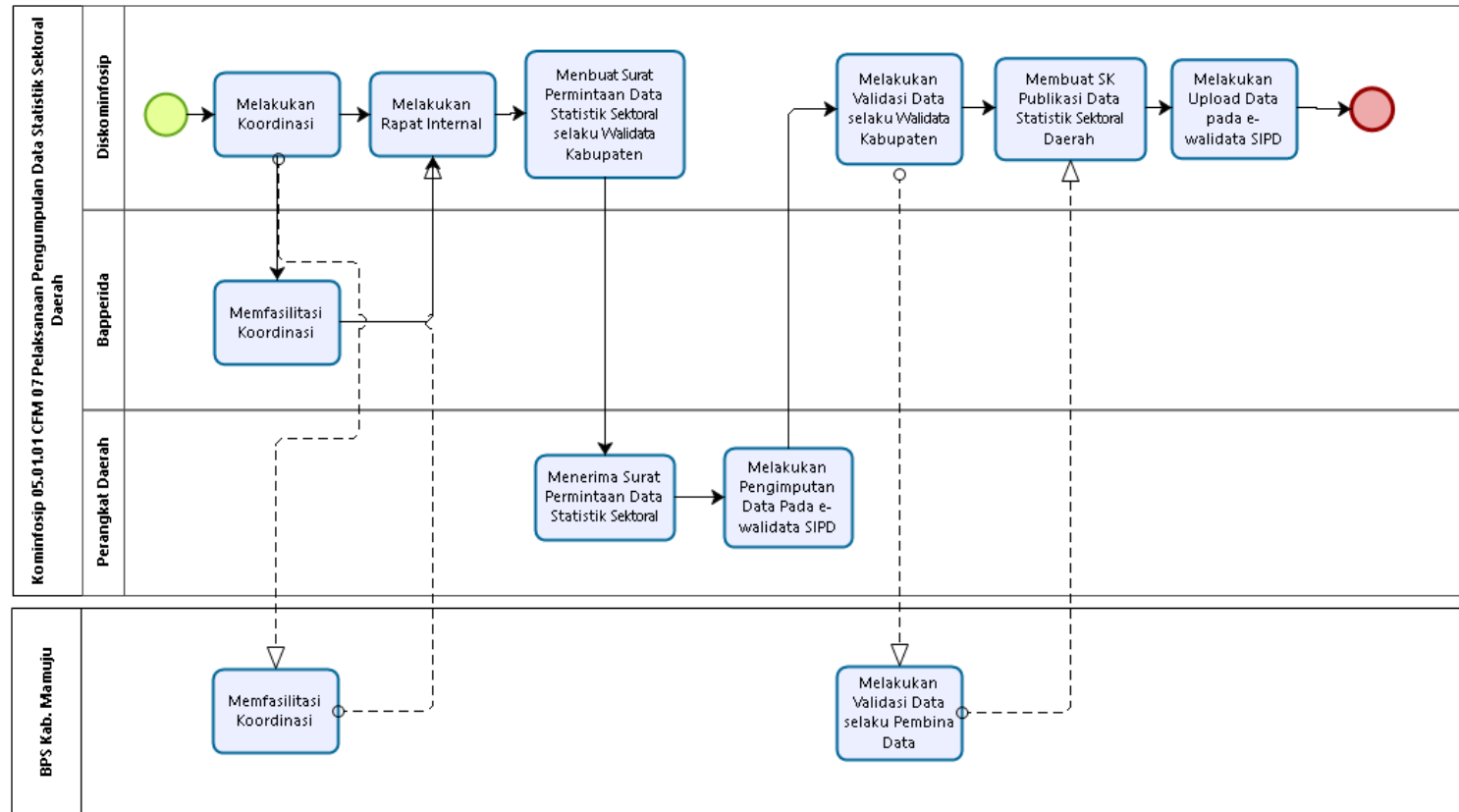
31 Kominfosip 05.01.01 CFM 05



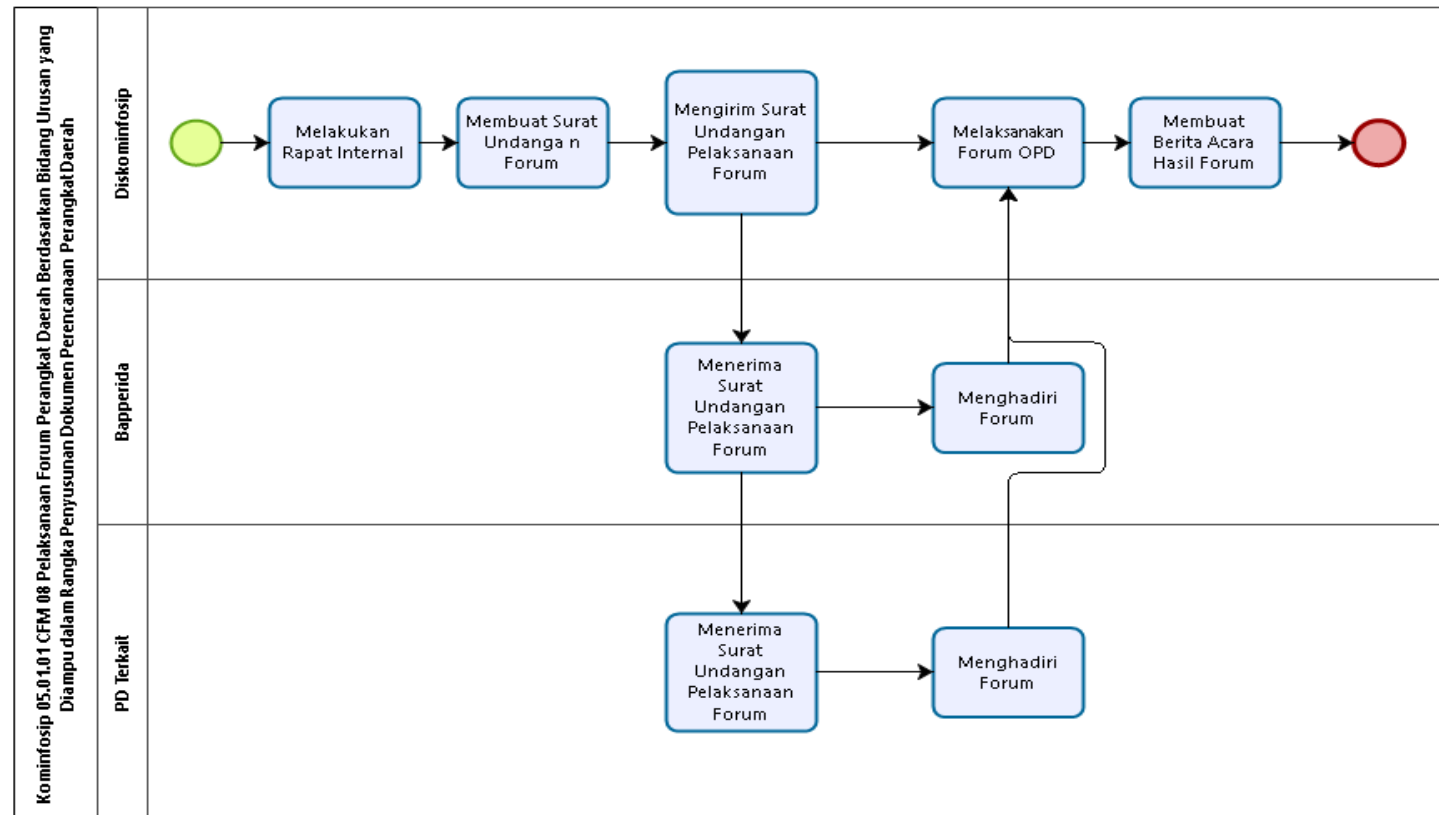
32 Kominfosip 05.01.01 CFM 06



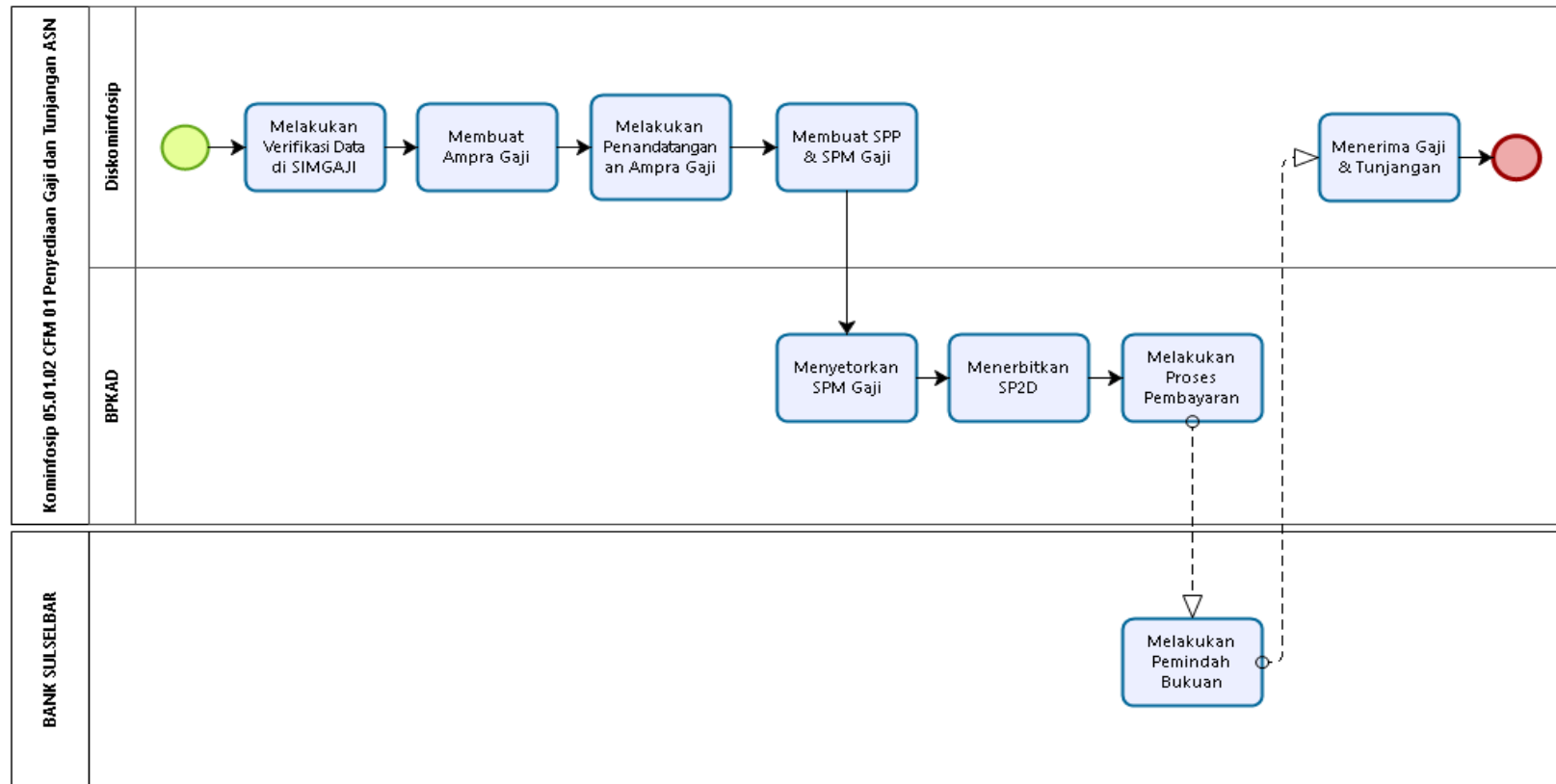
33 Kominfosip 05.01.01 CFM 07



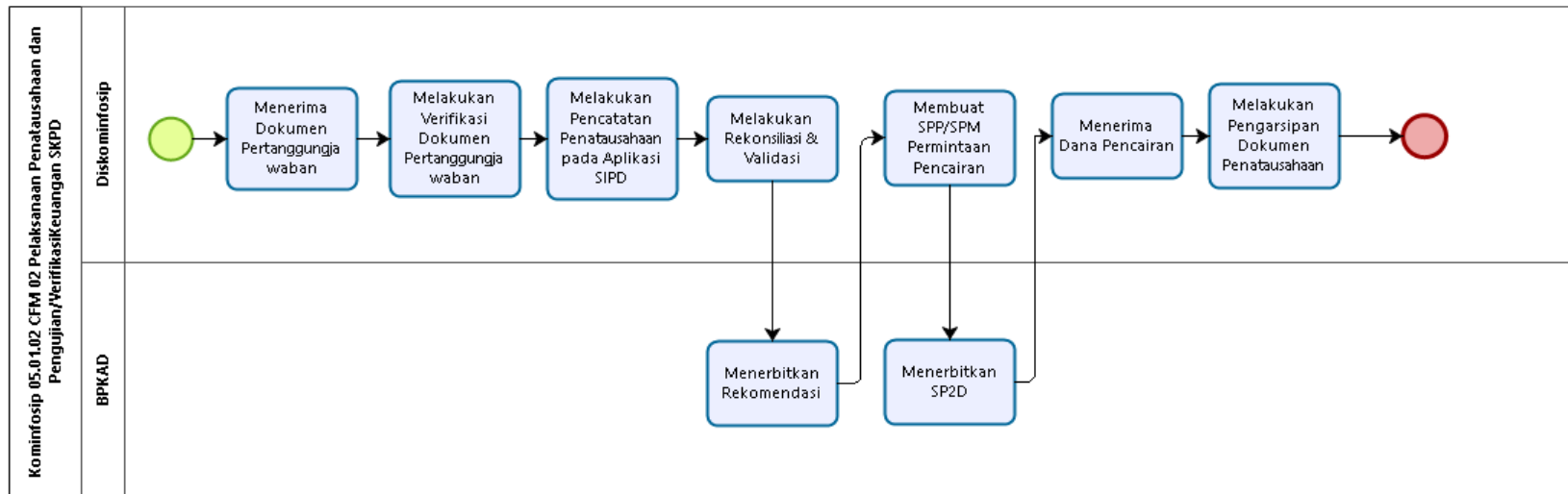
34 Kominfosip 05.01.01 CFM 08



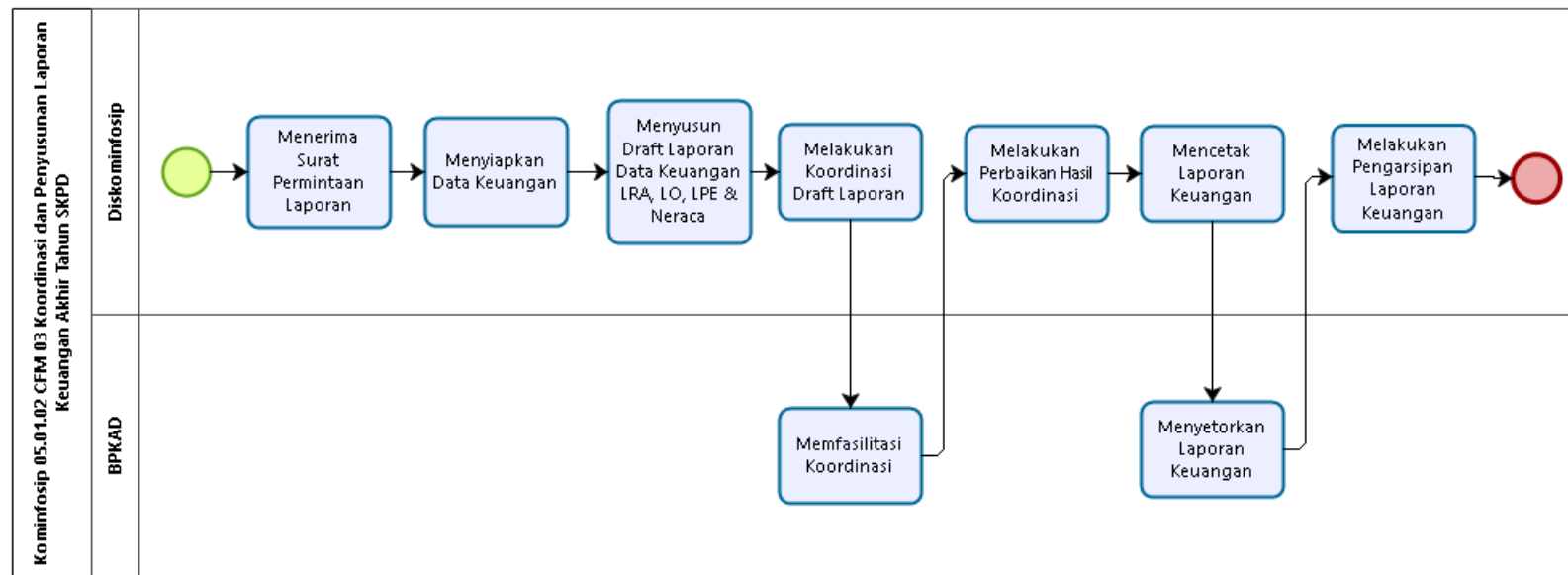
35 Kominfosip 05.01.02 CFM 01



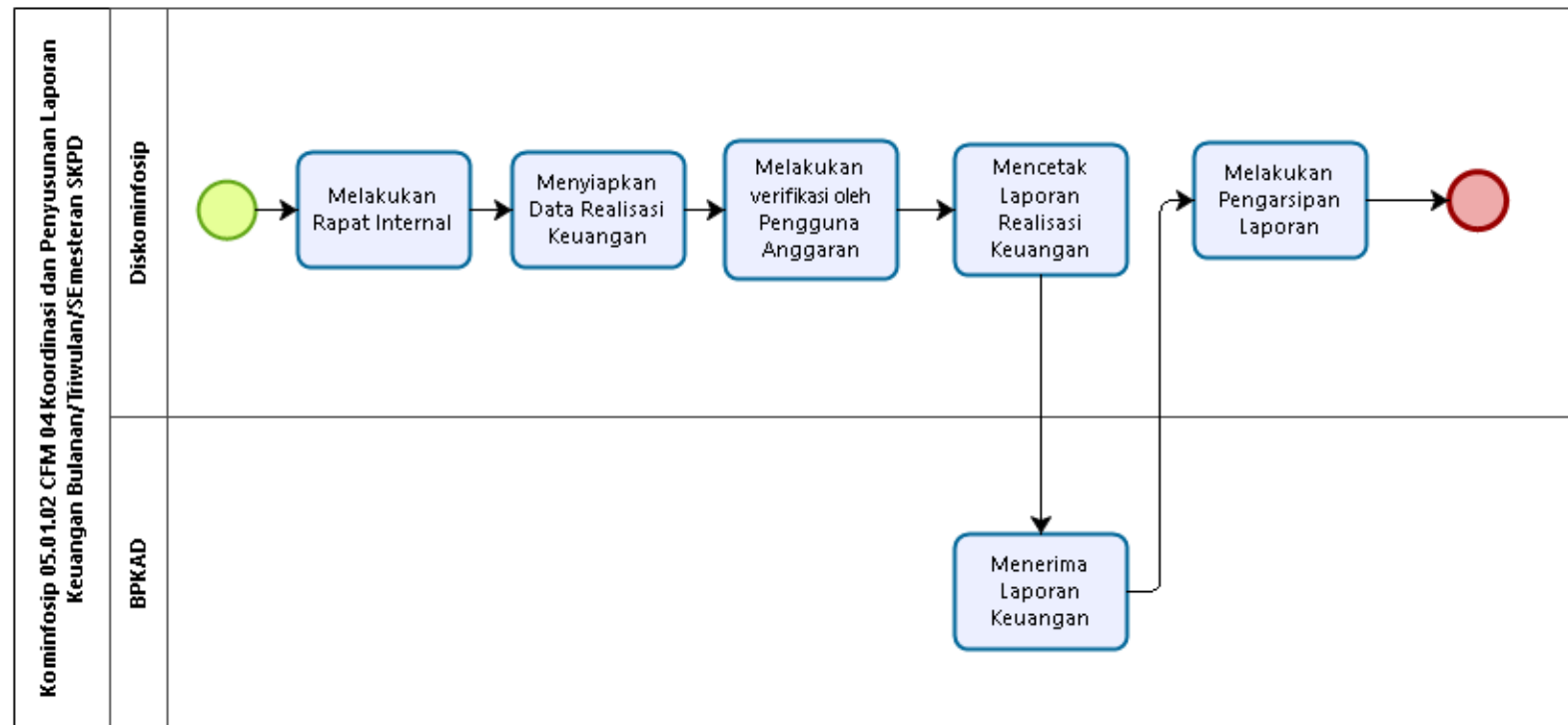
36 Kominfosip 05.01.02 CFM 02



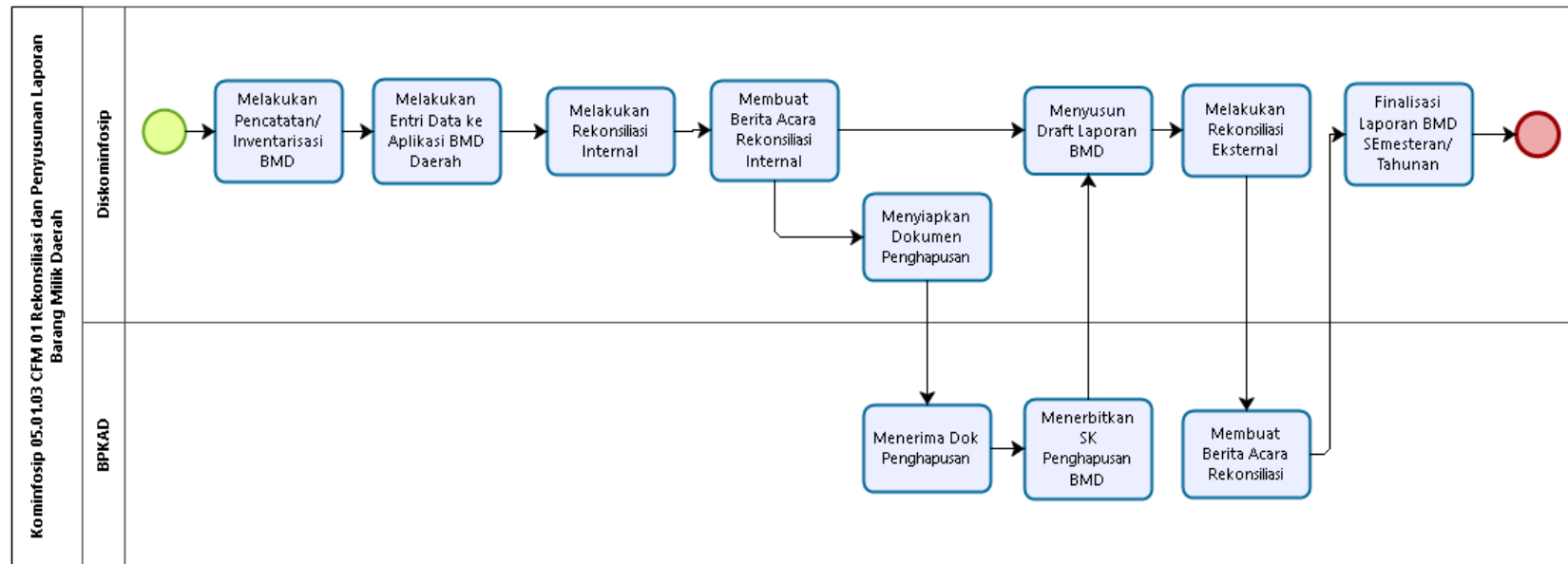
37 Kominfosip 05.01.02 CFM 03



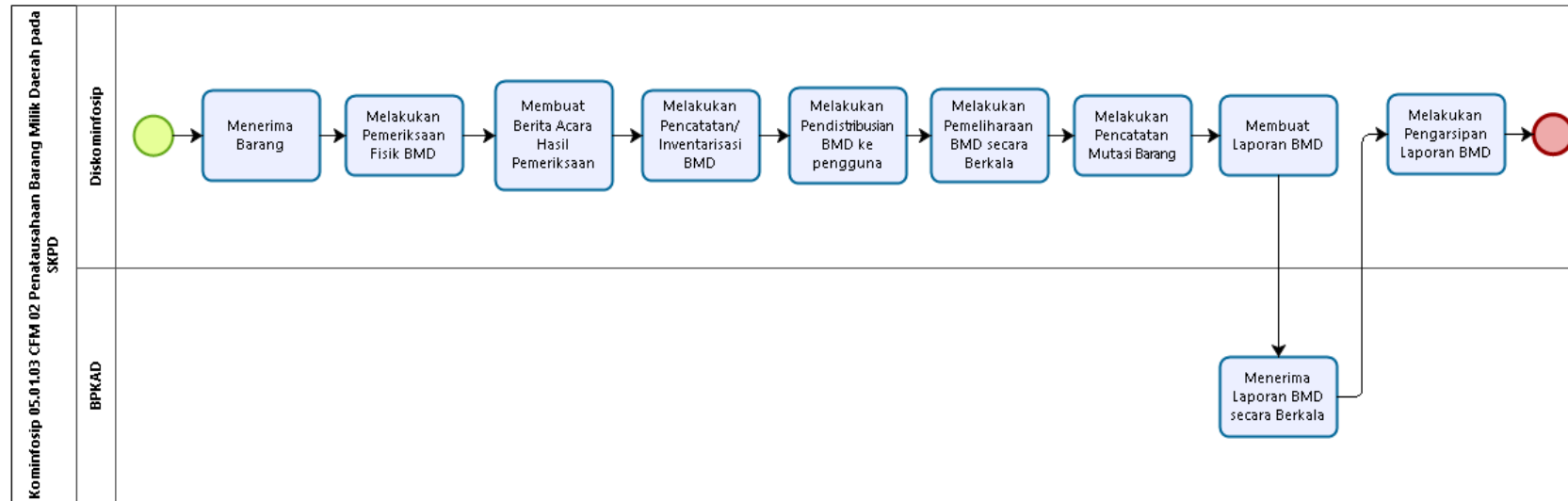
38 Kominfosip 05.01.02 CFM 04



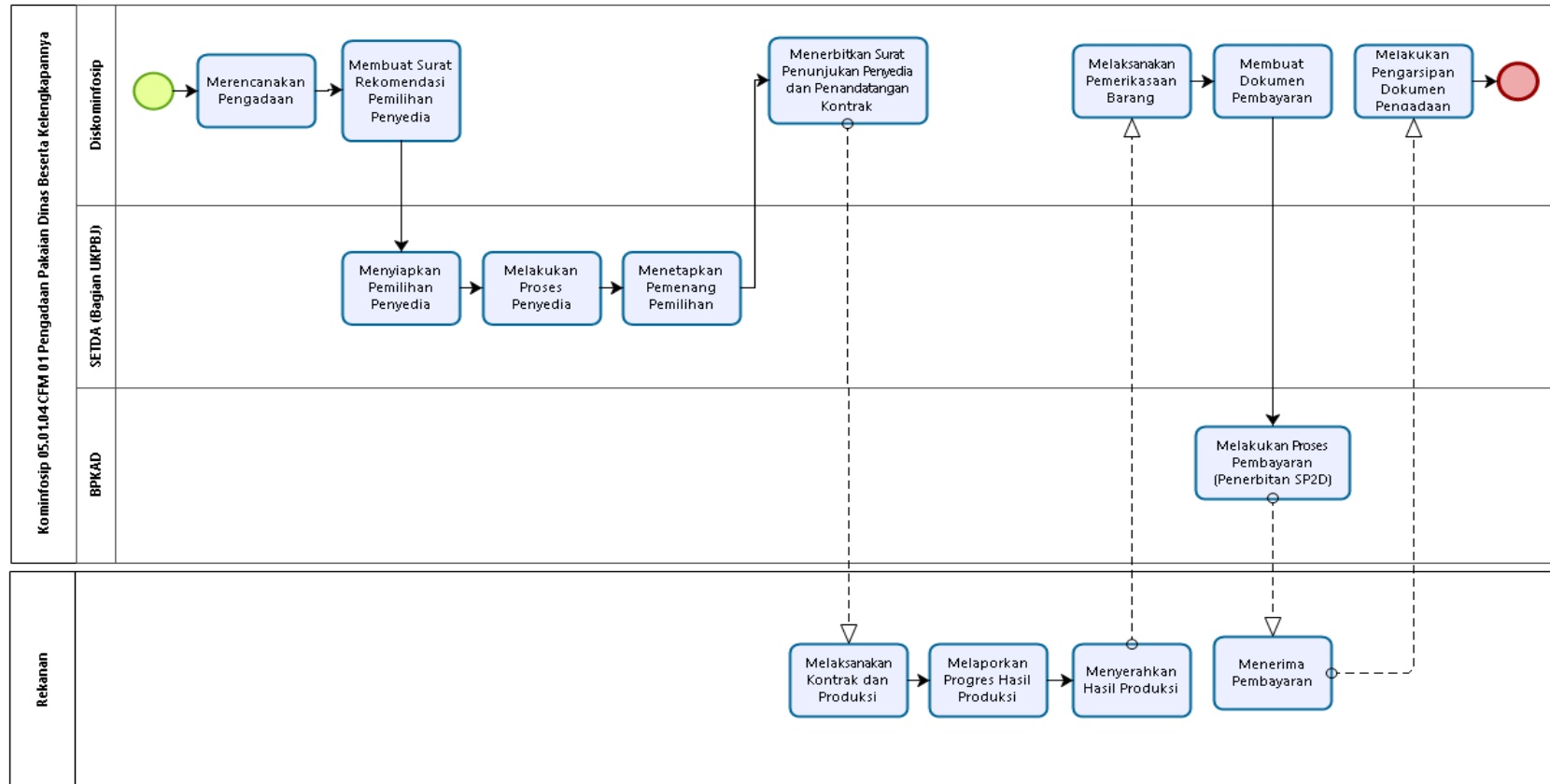
39 Kominfosip 05.01.03 CFM 01



40 Kominfosip 05.01.03 CFM 02



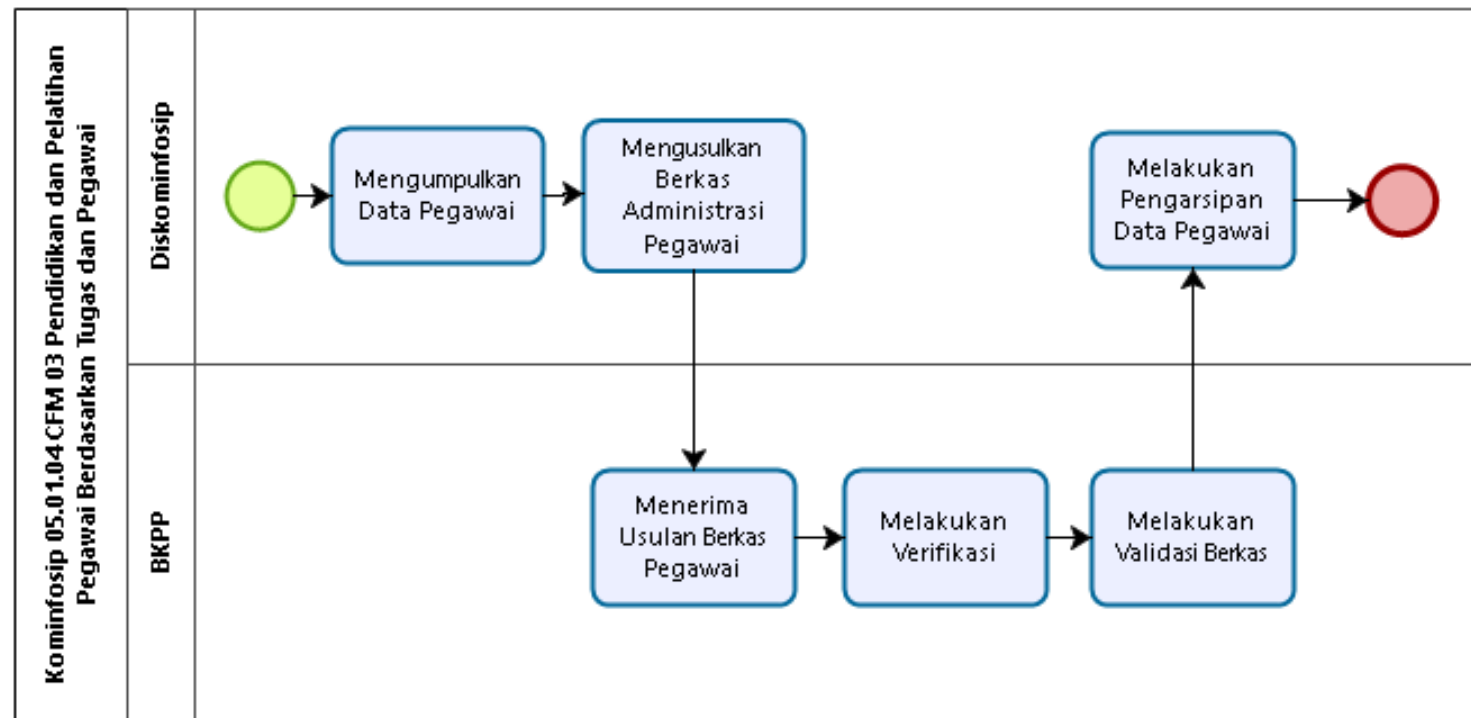
41 Kominfosip 05.01.04 CFM 01



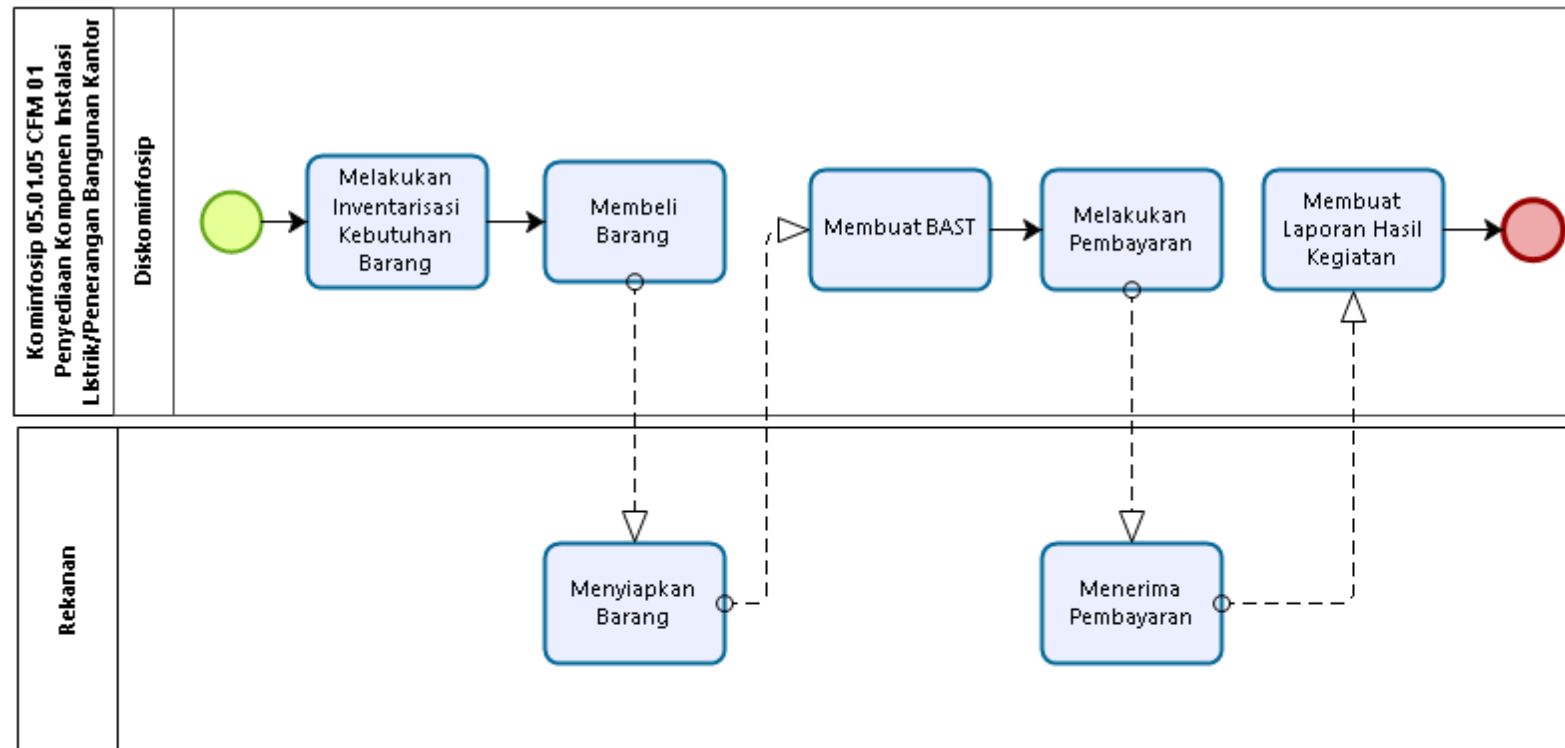
42 Kominfosip 05.01.04 CFM 02



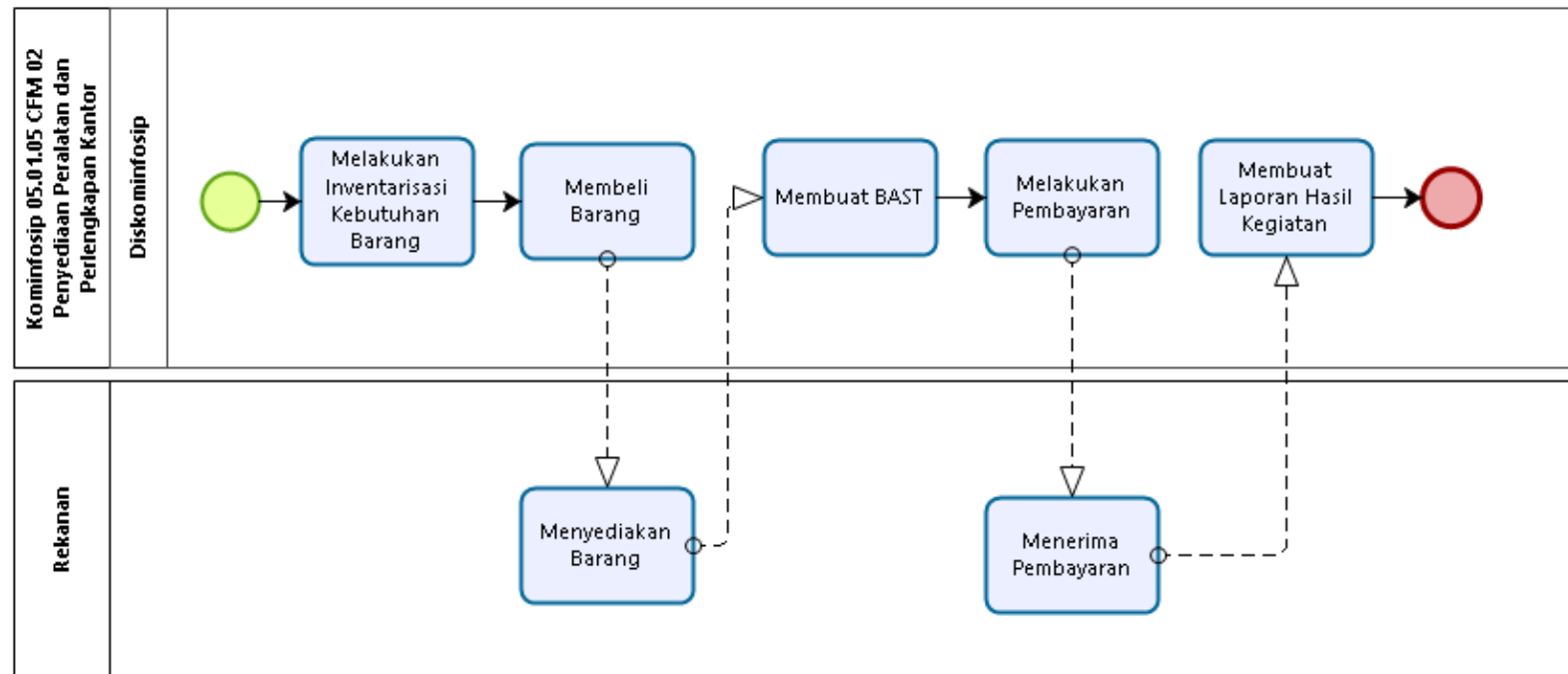
43 Kominfosip 05.01.04 CFM 03



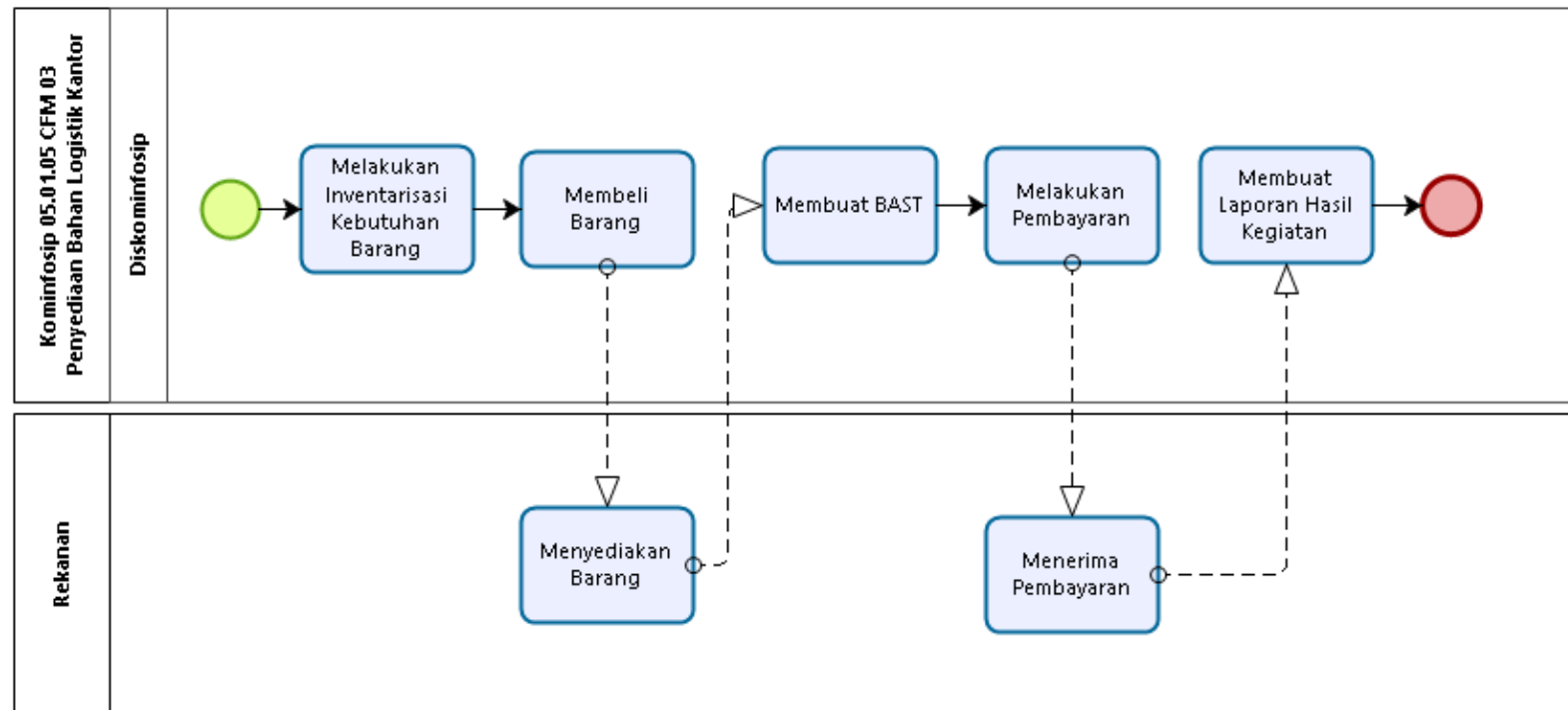
44 Kominfosip 05.01.05 CFM 01



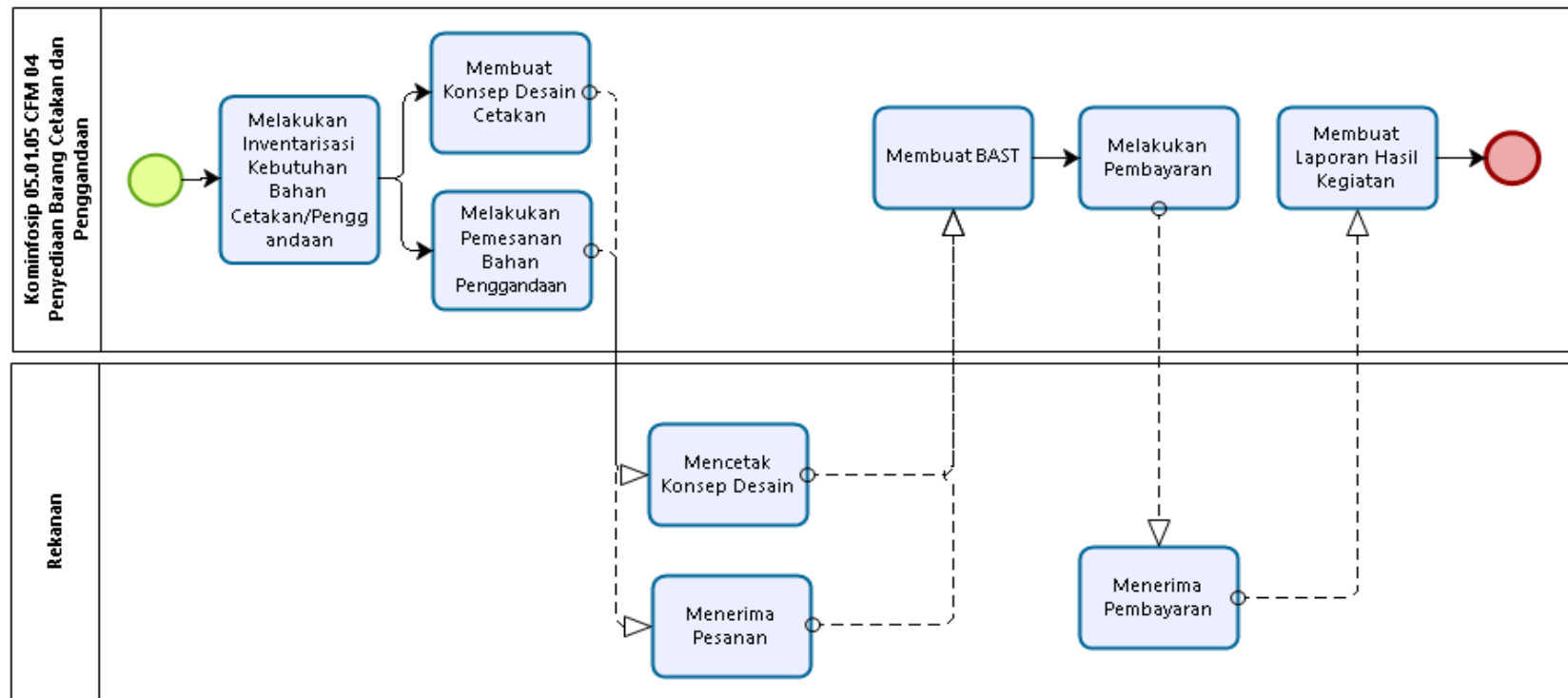
45 Kominfosip 05.01.05 CFM 02



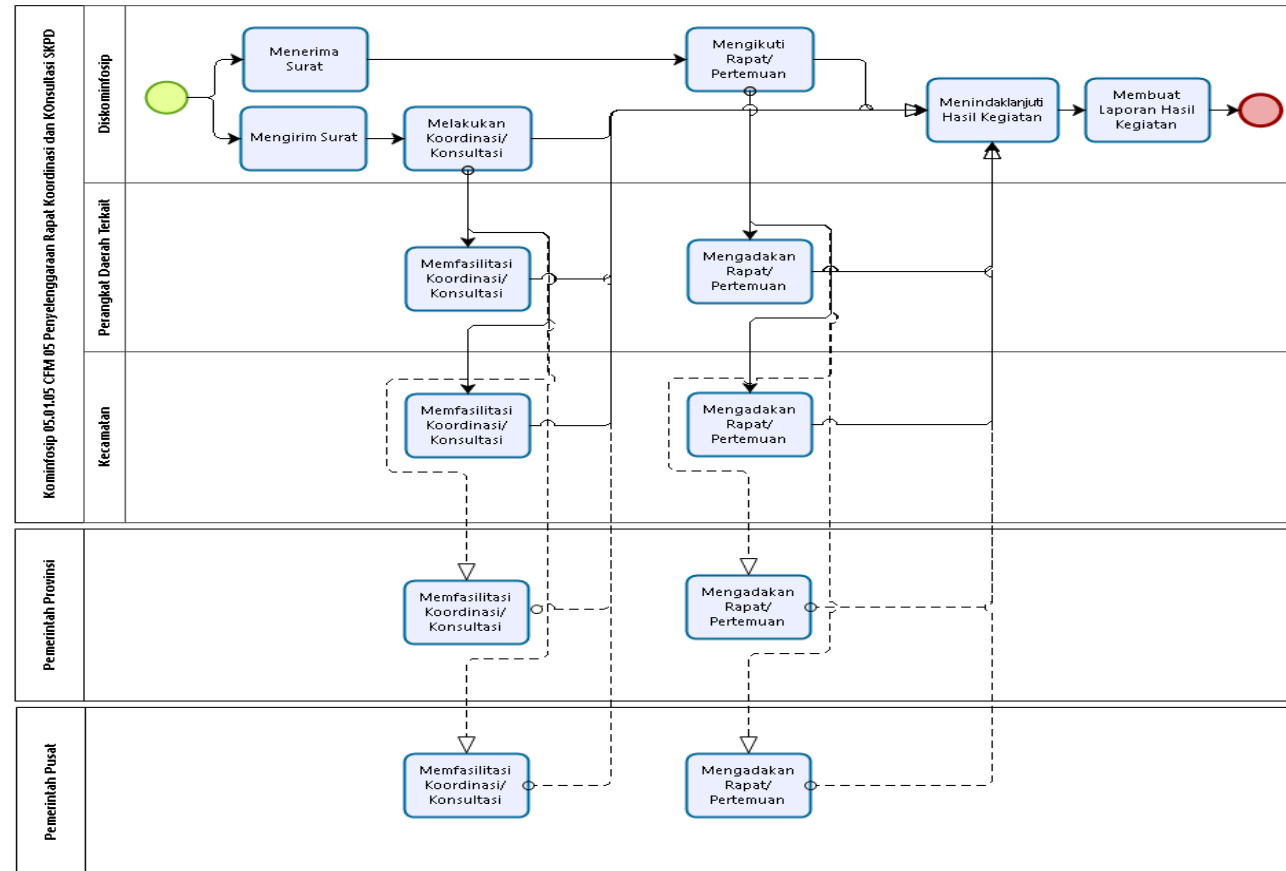
46 Kominfosip 05.01.05 CFM 03



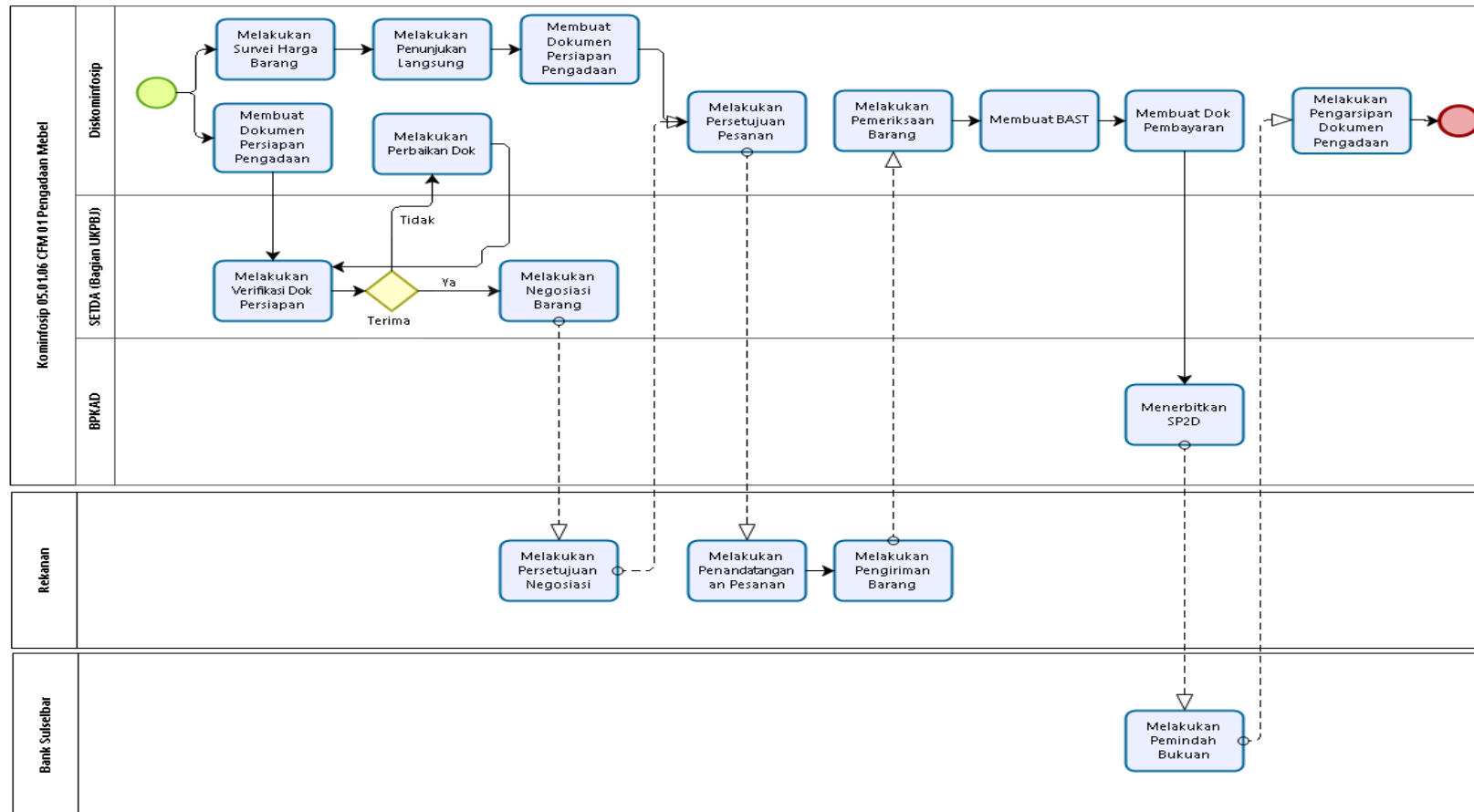
47 Kominfosip 05.01.05 CFM 04



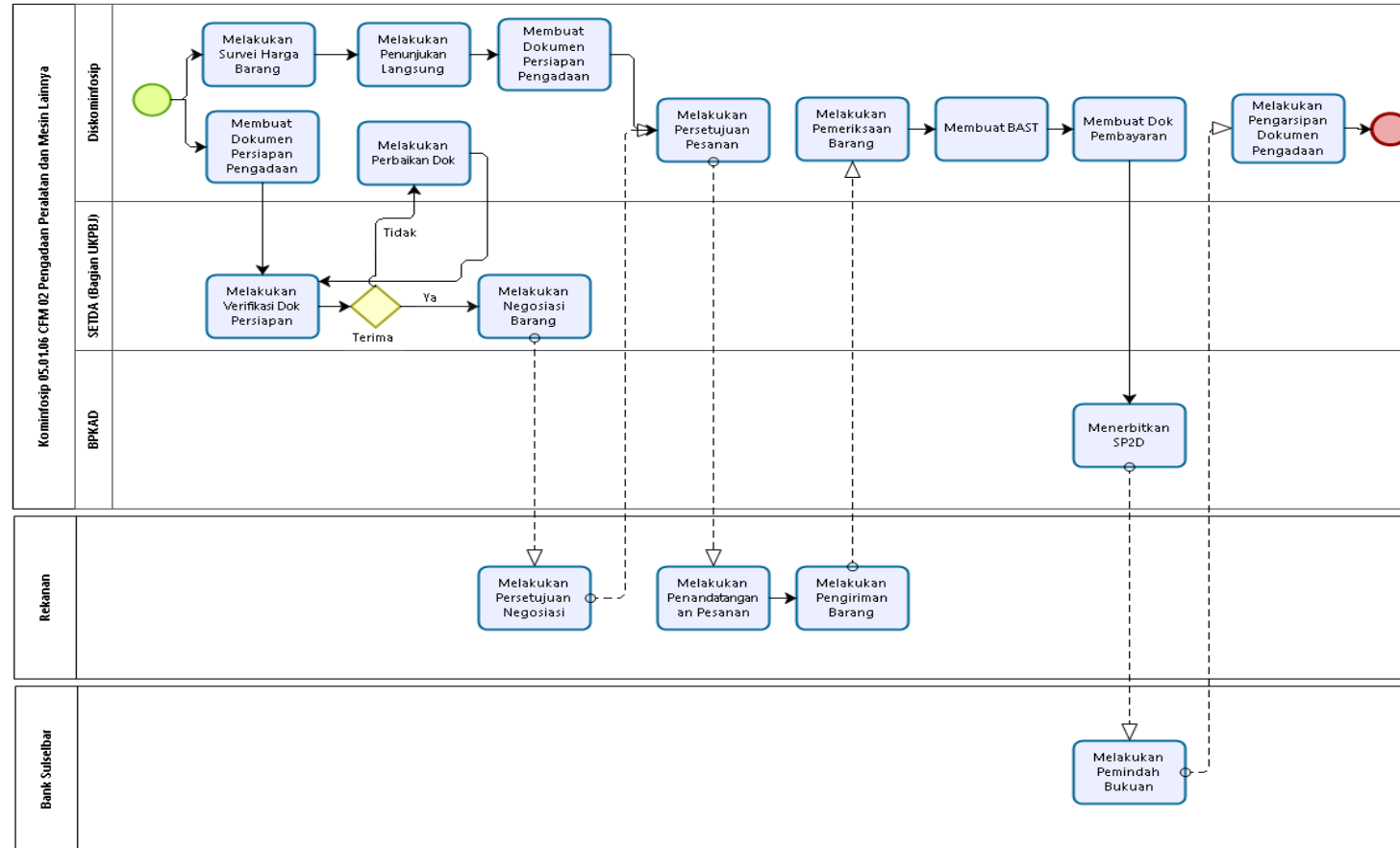
48 Kominfosip 05.01.05 CFM 05



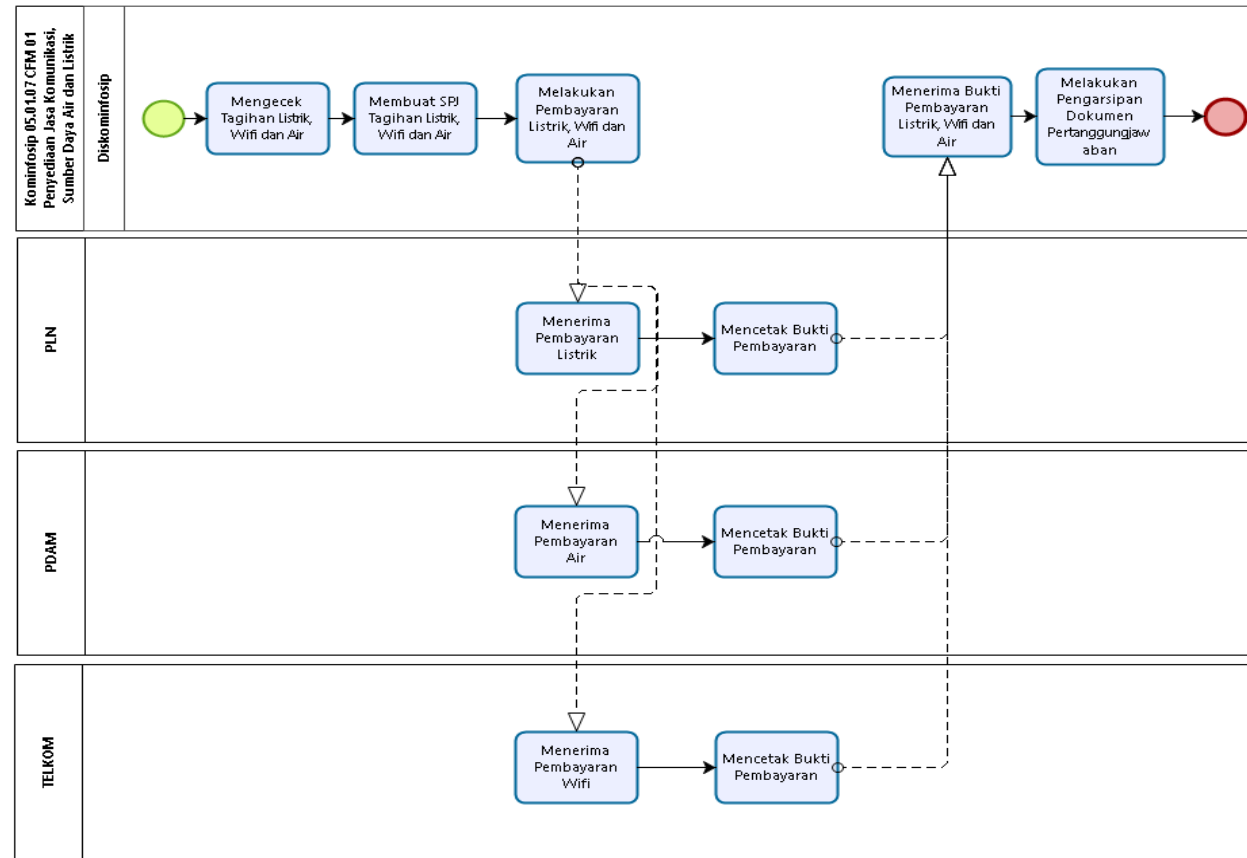
49 Kominfosip 05.01.06 CFM 01



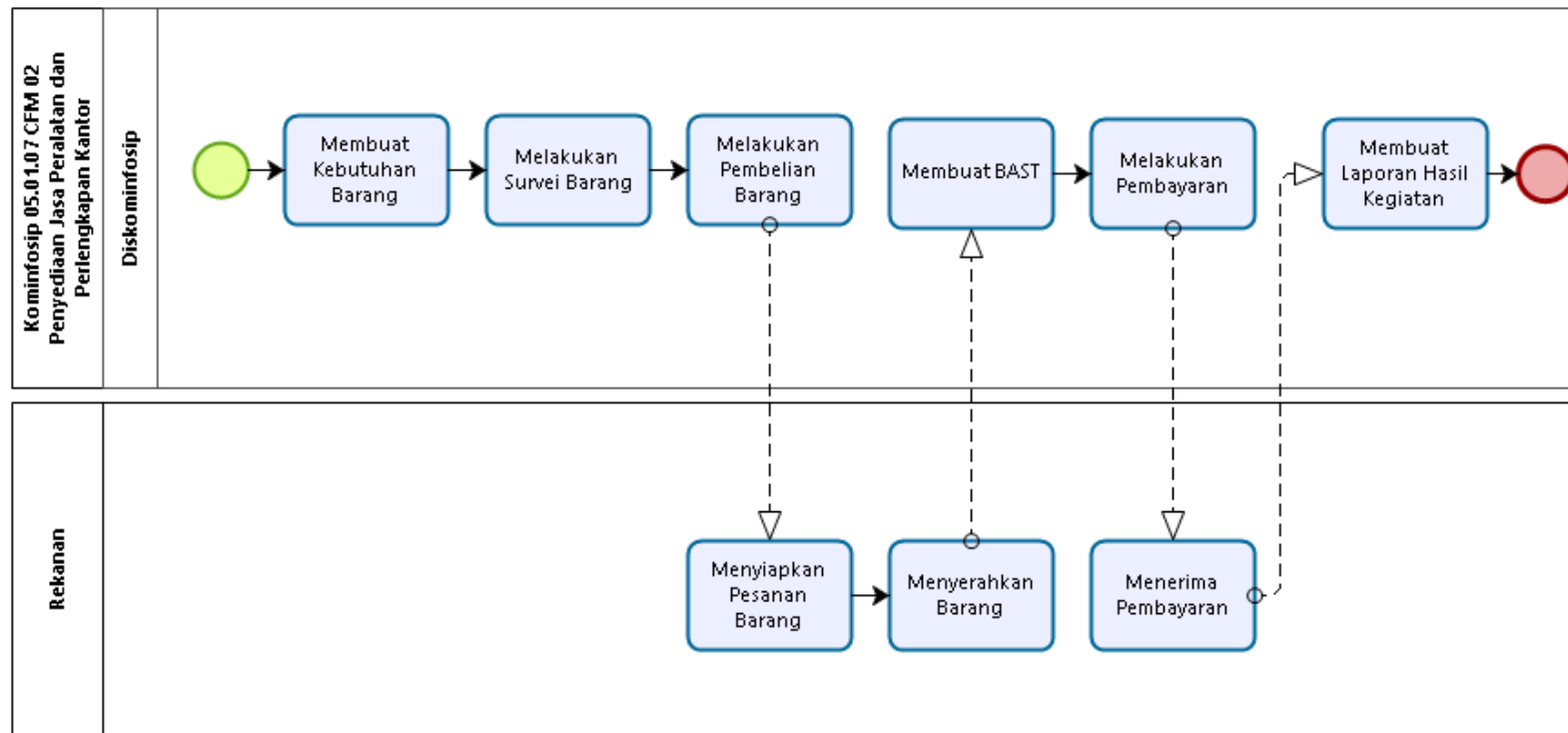
50 Kominfosip 05.01.06 CFM 02



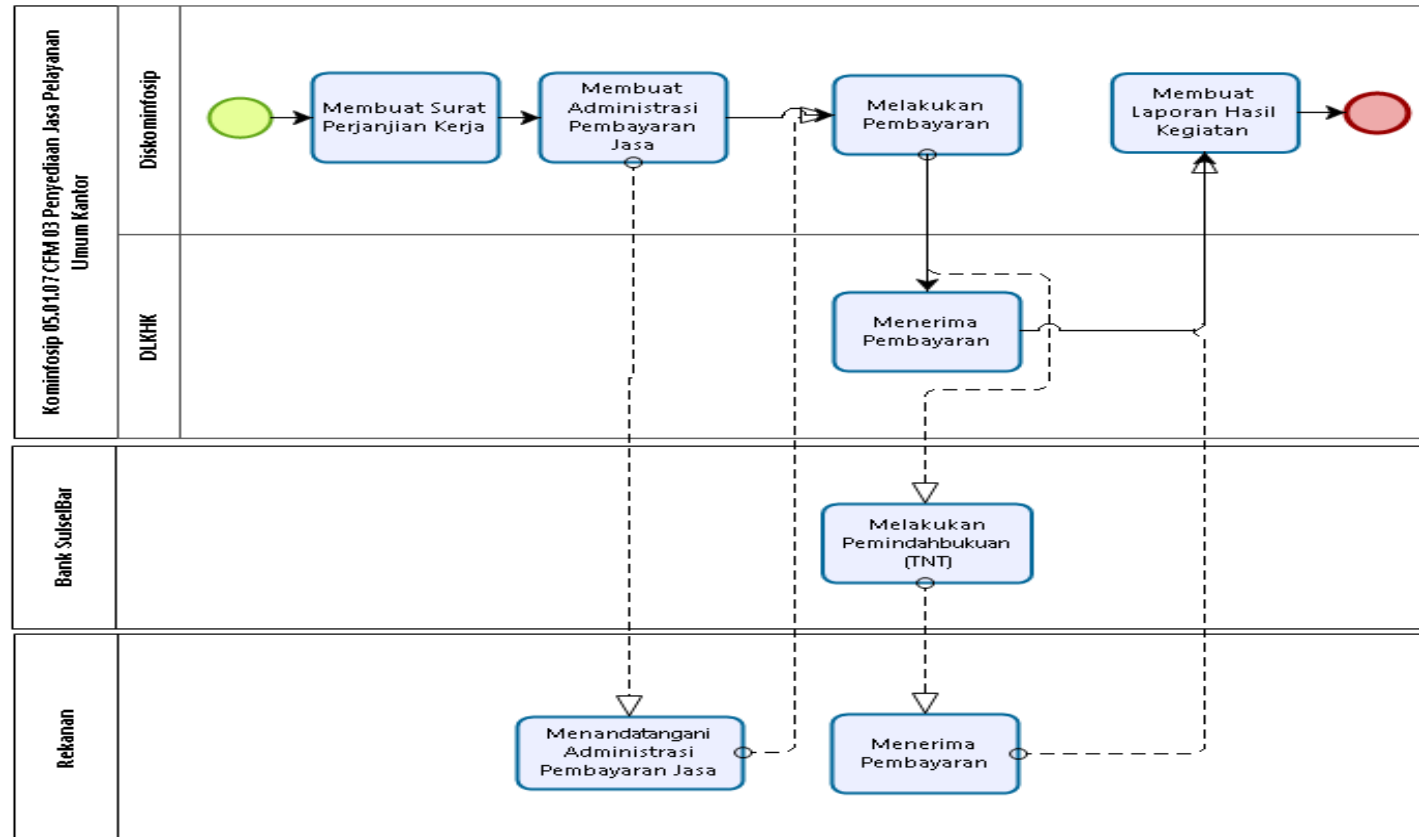
51 Kominfosip 05.01.07 CFM 01



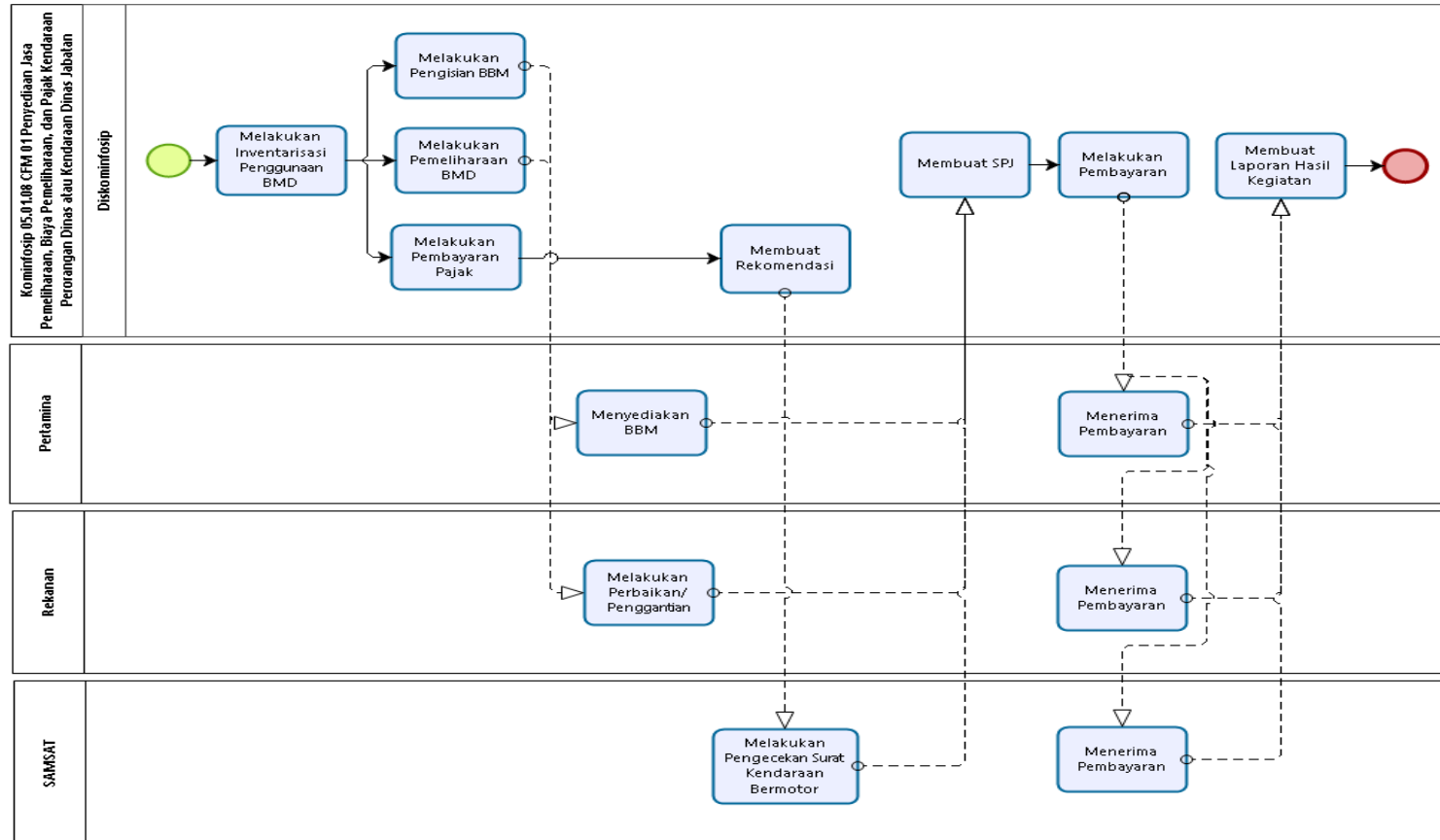
52 Kominfosip 05.01.07 CFM 02



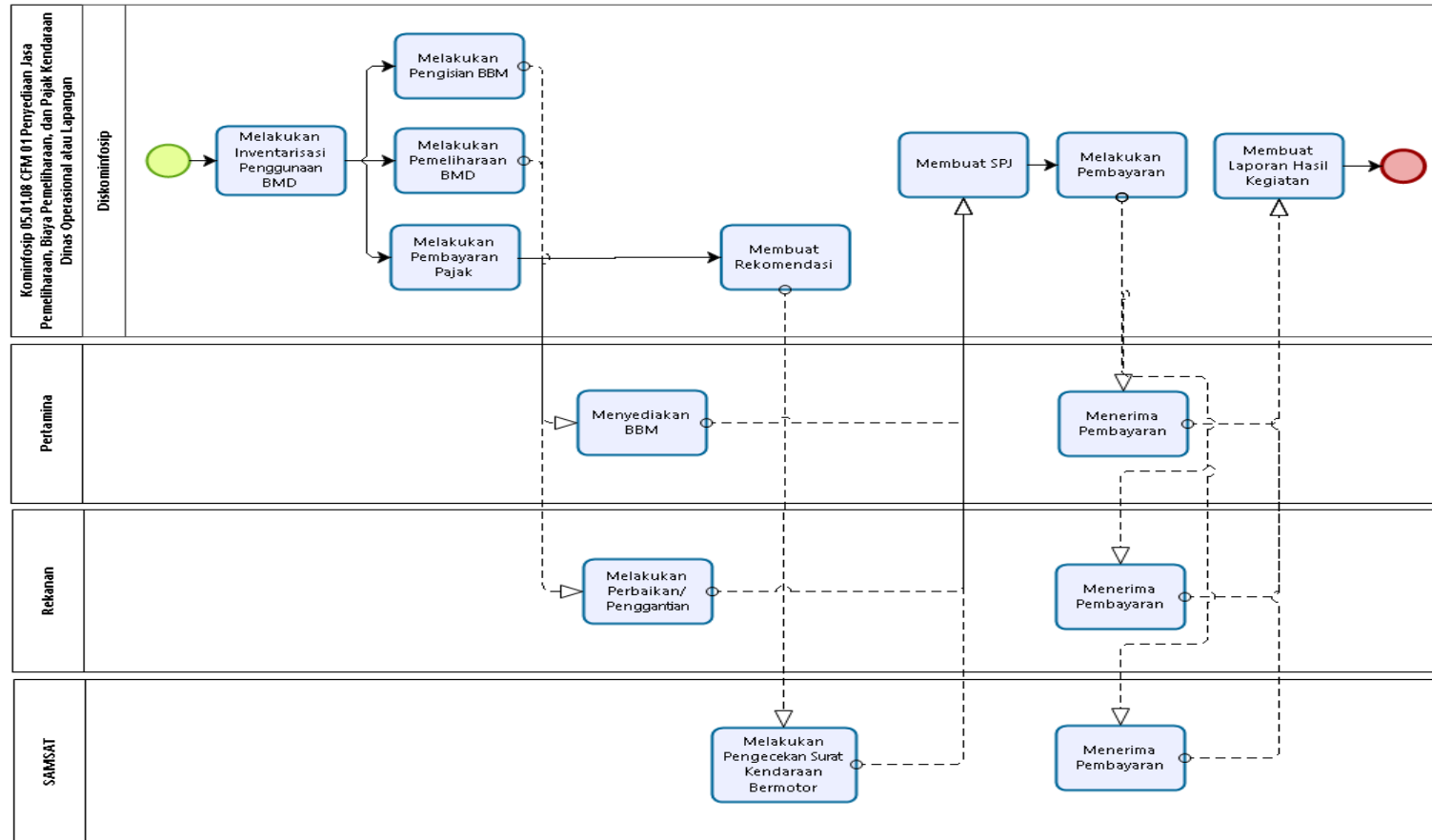
53 Kominfosip 05.01.07 CFM 03



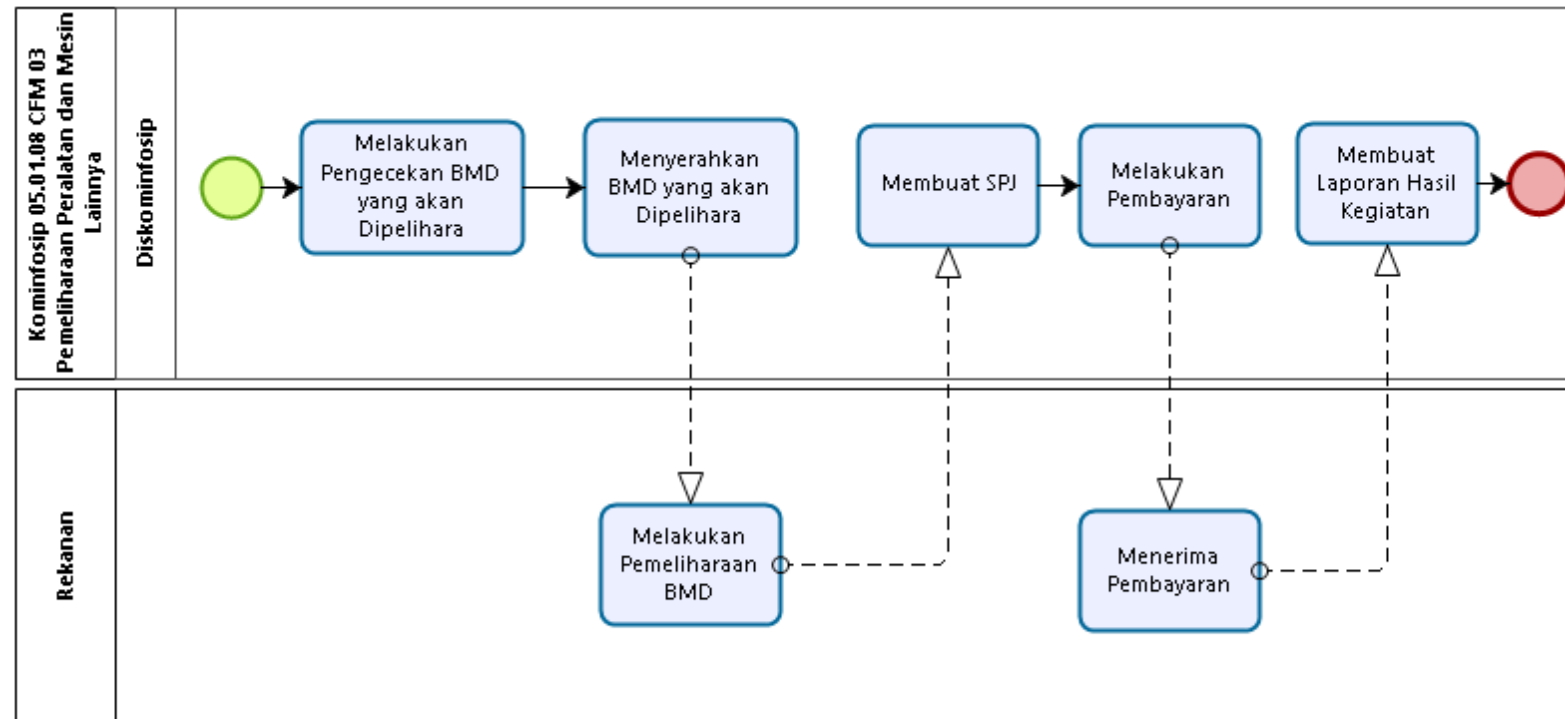
54 Kominfosip 05.01.08 CFM 01



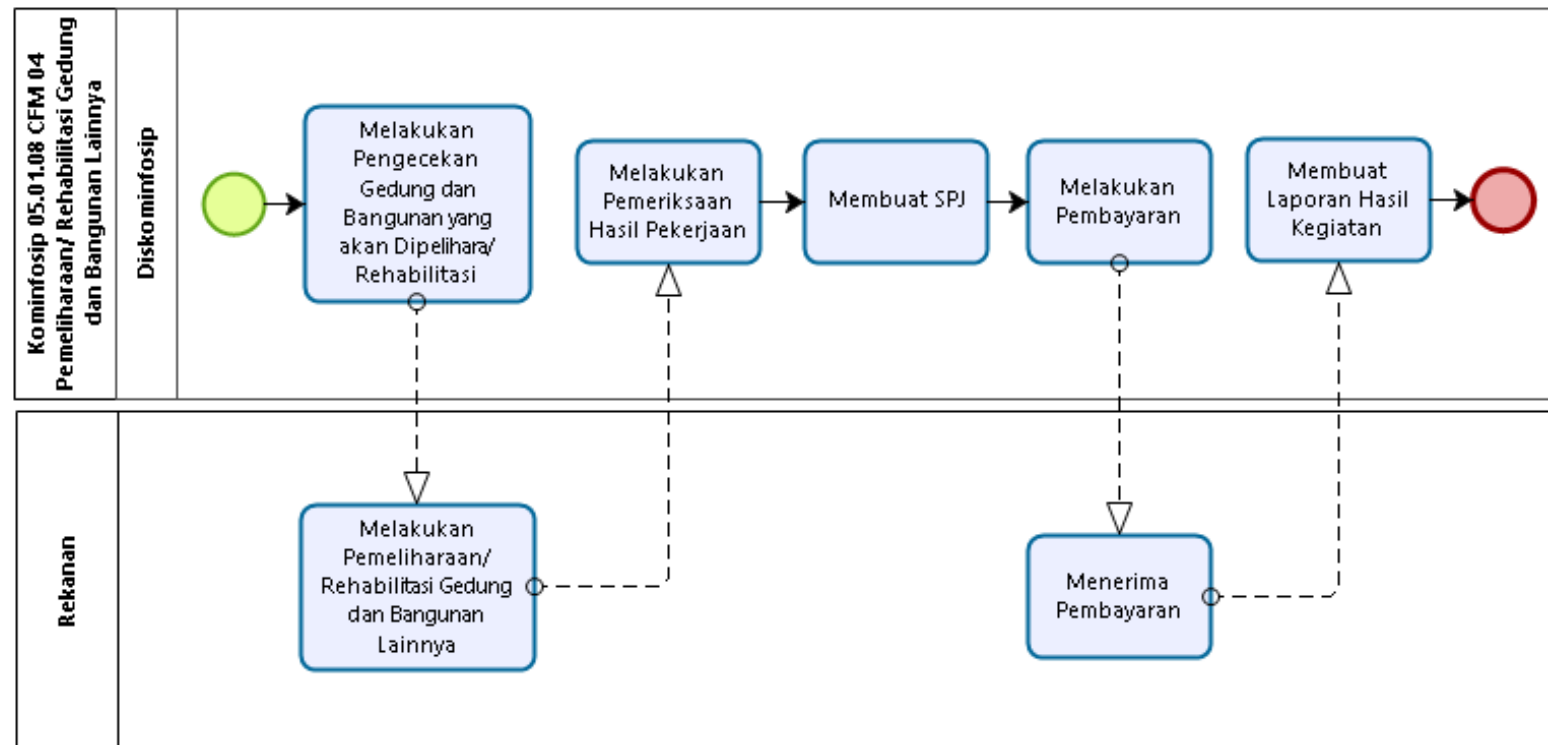
55 Kominfosip 05.01.08 CFM 02



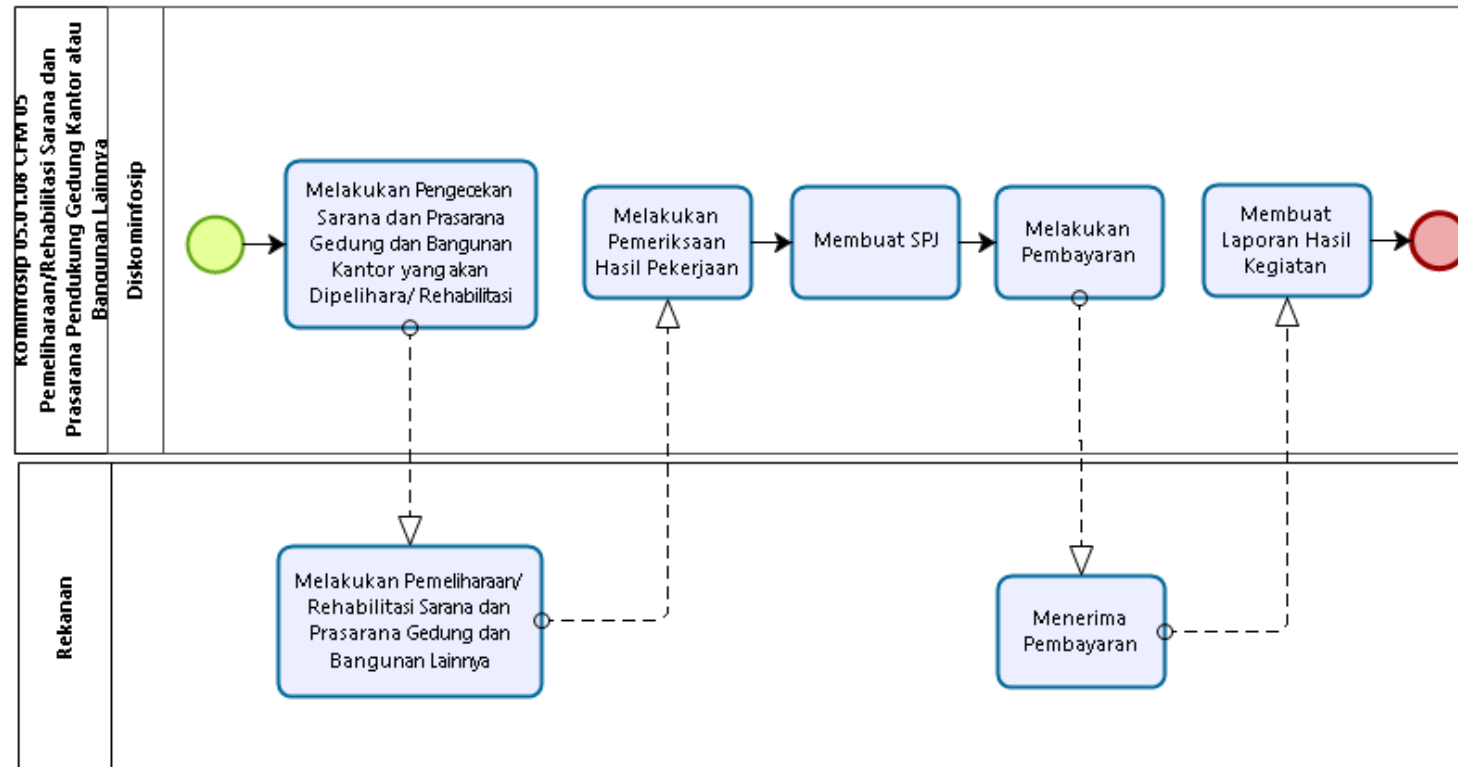
56 Kominfosip 05.01.08 CFM 03

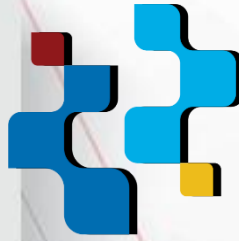


57 Kominfosip 05.01.08 CFM 04



58 Kominfosip 05.01.08 CFM 05





Pemerintah Kabupaten Mamuju
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



<https://diskominfosip.mamujukab.go.id>



@diskominfosip_mamuju



Diskominfosip Kabupaten Mamuju